



KECAMATAN BONTOMANAI

2021 – 2026

REVISI

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR KECAMATAN BONTOMANAI**

**TAHUN 2021**

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allat SWT atas limpahan rahmat dan berkat-Nya sehingga dapat disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra-SKPD ) Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

Dengan segala keterbatasan, di sadari pula bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai yang telah menjalankan tugas maupun kewajibannya.

i

Bahwa Renstra Kecamatan Bontomanai belum lengkap sesuai dengan harapan oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat untuk bahan perencanaan dan evaluasi di masa yang akan datang.

Polebunging, April 2021

**CAMAT BONTOMANAI,**

**ZULFIKRI,S.STP**

**Pangkat : Pembina**

**NIP.19790818 199711 1 002**

# DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I. | PENDAHULUAN ........................................................ | 1 |
| 1.1. | Latar Belakang ......................................................... | 1 |
| 1.2. | Landasan Hukum....................................................... | 2 |
| 1.3. | Maksud dan Tujuan.......................................................... | 10 |
| 1.4. | Sistimatika Penulisan........................................................ | 12 |
| BAB II. | GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMANAI...... | 14 |
| 2.1. | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi............................. | 14 |
| 2.2. | Sumber Daya Kecamatan Bontomanai………………………… | 39 |
| 2.3. | Kinerja Pelayanan.............................................................. | 44 |
| 2.4. | Analisis,Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.. | 50 |
| BAB III. | PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS........................... | 57 |
| 3.1. | Identifikasi Permasalahan.................................................. | 57 |
| 3.2. | Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH............. | 59 |
| 3.3. | Telaahan Renstra K/L, Provinsi......................................... | 64 |
| 3.4. | Telaahan RTRW dan KLHS................................................. | 65 |
| 3.5. | Penentuan Isu-isu Strategis............................................... | 74 |
| BAB IV. | TUJUAN DAN SASARAN.................................................... | 77 |
| 4.1. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD……………… | 77 |
| 4.2. | Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD… | 80 |
| 4.3. | Hubungan Tujuan dan Sasaran OPD dan RPJMD............. | 82 |
| BAB V. | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.................................... | 84 |
| 5.1. | Tujuan,Sasaran,Strategis dan Kebijakan OPD................... | 86 |
| 5.2. | Perubahan Tujuan,Sasaran,Strategis dan Kebijakan OPD.. | 88 |
| BAB VI. | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..................................................................... | 90 |
| 6.1. | Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran ............................................................ | 96 |
| 6.2. | Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran ............................................... | 112 |
| BAB VII. | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN........ | 138 |
| 7.1. | Indikator Kinerja Kecamatan Bontomanai | 140 |
| BAB VIII. | PENUTUP.......................................................................... | 142 |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **1. Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, sebagaimana dalam Permendagri 90 Tahun 2019 nomenklatur Urusan Kewilayahan, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan demikian pula dengan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi.

Rencana Strategis Kecamatan Bontomanai tahun 2021-2026 disusun yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bontomanai didasarkan pada kondisi yang diinginkaan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026.

Lebih jauh, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (pada periode keempat) dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun tahun 2013 - 2023. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Nasional, RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD dan RTRW kabupaten lain yang berdekatan, agar terdapat keharmonisan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dalam bingkai arah pembangunan provinsi dan arah pembangunan Nasional, serta arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Kesemua pendekatan tersebut sebagaimana telah diatur oleh Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**1. 2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang - Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cata Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Inndonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
41. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor )
57. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bontomanai.

**1. 3. Maksud dan Tujuan**

1.3.1. Maksud

Rencana strategis (Restra) Kecamatan Bontomanai Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud, untuk :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh perangkat daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026
2. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

.

1.3.2. Tujuan

a.Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;

b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;

c. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;

d. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;

e. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT, RW, Dokumen Potensi Daerah yang ada di desa, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;

f. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Bontomanai supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;

g. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;

h. Meletakan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;

i. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

j. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

1. **4. Sistematika Penulisan**

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 8 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMANAI

Memuat struktur organisasi dan memberikan informasi tentang peran ( Tugas dan Fungsi ) Kecamatan Bontomanai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas, apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaran tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Bontomanai periode sebelumnya, mengemukakan, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Bontomanai ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOMANAI

Dalam bab ini dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dalam bab ini

diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Bontomanai 2021 – 2026. Bab ini juga memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, telaan RTRW dan KHLS.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bonomanai Tahun 2021 – 2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumasan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bontomanai dalam 5 tahun mendatang. Demikian pula dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Bontomanai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bontomanai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026.

BAB VIII

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah.

**BAB II**

**GAMBARAN DAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMANAI**

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontomanai mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Bontomanai :

**2.1.Fungsi, Tugas dan Struktur Organisasi Kecamatan**

**Bontomanai**

**2.1.1. Fungsi Kecamatan Bontomanai**

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
7. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
8. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

**2.1.2.Tugas Kecamatan Bontomanai**

**2.1.2.1. CAMAT**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan urusan pemerintahan umum;
7. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
10. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
12. Melaksanakan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
13. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
14. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
15. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya,

**2.1.2.2. SEKRETARIS**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
7. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
8. Mengelola administrasi umum;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
10. Mengelola administrasi keuangan;
11. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
12. Melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

**2.1.2.2.1 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Memimpin dan membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketetausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Tahapan :

* Mengumpulkan bahan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
* Mengidentifikasi bahan rencana rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian
* Merumuskan dan menetapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
* Mendokumentasikan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian

1. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
* Mengidentifikasikan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
* Mengkoordinasikan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas ;
* Melakukan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
* Melakukan rapat dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
* Melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas;
* Mendokumentasikan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan dalam penyusanan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
* Mengidentifikasi bahan dalam penyusanan rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas ;
* Mengelola penyusanan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
* Mendokumentasikan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.

e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan yang akan dibahas dalam rapat;
* Mengidentifikasi bahan dalam melaksanakan rapat;
* Melaksanakan rapat;
* Mendokumentasikan pelaksanaan rapat..

f. Melakukan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian ;
* Mengidentifikasi bahan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
* Melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
* Mendokumentasikan hasil pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian.

g. Melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
* Mengidentifikasi bahan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
* Melaksanakan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
* Mendokumentasikan hasil pelayanan teknis administrasi Kecamatan.

h. Melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
* Mengidentifikasi bahan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
* Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
* Mendokumentasikan hasil pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat.

i. Melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
* Mengidentifikasi bahan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
* Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
* Mendokumentasikan hasil pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan.

j. Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
* Mengidentifikasi bahan Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
* Melaksanakan Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
* Mendokumentasikan hasil Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor.

k. Melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
* Melakukan rapat dalam rangka pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
* Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
* Mendokumentasikan hasil pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan

l. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
* Melakukan rapat dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
* Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
* Mendokumentasikan hasil penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

m. Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
* Melakukan rapat dalam rangka pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
* Melaksanakan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
* Mendokumentasikan hasil pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan

n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
* Melakukan rapat dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
* Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
* Mendokumentasikan hasil koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas

o. Menilai Kinerja Pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
* Melakukan rapat dalam rangka menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
* Melaksanakan penilaian kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
* Mendokumentasikan hasil penilaian kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
* Melakukan rapat dalam rangka laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
* Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
* Mendokumentasikan hasil laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tahapan:

* Menerima penugasan kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
* Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
* Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepada pimpinan;
* Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

**2.1.2.2.2. Sub Bagian Program dan Keuangan**

Memimpin dan membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan..

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program, dan keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Tahapan :

* Mengumpulkan bahan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
* Mengidentifikasi bahan rencana rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
* Merumuskan dan menetapkan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
* Mendokumentasikan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan.

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
* Mengidentifikasikan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
* Mengkoordinasikan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas ;
* Melakukan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
* Melakukan rapat dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
* Melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas;
* Mendokumentasikan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan dalam penyusanan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
* Mengidentifikasi bahan dalam penyusanan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas ;
* Mengelola penyusanan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
* Mendokumentasikan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.

e.. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan yang akan dibahas dalam rapat;
* Mengidentifikasi bahan dalam melaksanakan rapat;
* Melaksanakan rapat;
* Mendokumentasikan pelaksanaan rapat..

1. Melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
* Mengadakan rapat dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
* Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
* Mendokumentasikan hasil penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah.

1. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan.

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
* Mengidentifikasi bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
* Mengajukan bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
* Mendokumentasikan hasil bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan.

1. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;

Tahapan:

* Mempersiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor
* Mengidentifikasi dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
* Melaksanakan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
* Mendokumentasikan hasil dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor.

1. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
* Mengidentifikasi bahan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
* Melaksanakan koordinasi rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
* Mendokumentasikan hasil rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran.

1. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
* Mengidentifikasi bahan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
* Melaksanakan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
* Mendokumentasikan hasil verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan.

1. Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
* Melakukan rapat dalam rangka pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
* Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
* Mendokumentasikan hasil pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan.

1. Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
* Mengidentifkasi bahan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
* Melaksanakan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
* Mendokumentasikan hasil pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan

1. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
* Mengidentifkasi bahan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
* Melaksanakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
* Mendokumentasikan hasil laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan.

1. Menyusun neraca keuangan kecamatan;

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan neraca keuangan kecamatan;
* Mengidentifkasi bahan neraca keuangan kecamatan;
* Melaksanakan neraca keuangan kecamatan;
* Mendokumentasikan hasil neraca keuangan kecamatan.

1. Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
* Mengidentifkasi bahan informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
* Melaksanakan informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
* Mendokumentasikan hasil informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan.

1. Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan

Tahapan:

* Mempersiapkan bahan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
* Mengidentifkasi bahan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
* Melaksanakan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
* Mendokumentasikan hasil koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan.

1. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.

Tahapan:

* Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.
* Mengkoordinasikan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.
* Melaksanakan penyusunan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.
* Melaporkan hasil bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan

Tahapan:

* Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan
* Mengkoordinasikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan
* Melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan
* Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan

1. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan

Tahapan:

* Menyiapkan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan
* Mengkoordinasikan laporan hasil monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan
* Melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan
* Melaporkan hasil monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas

Tahapan:

* Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas
* Mengkoordinasikan laporan hasil koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas
* Melaksanakan penyusunan laporan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas
* Melaporkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas

1. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

Tahapan:

* Menyiapkan bahan menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
* Mengkoordinasikan laporan hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
* Melaksanakan penyusunan laporan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
* Melaporkan hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

1. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

Tahapan:

* Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
* Mengkoordinasikan laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
* Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
* Melaporkan hasil laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

1. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tahapan:

* Menyiapkan bahan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
* Mengkoordinasikan laporan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
* Melaksanakan penyusunan laporan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
* Melaporkan hasil laporan pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.1.2.3. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksnaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
7. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
8. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
10. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
11. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
12. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.1.2.4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
7. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
8. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
9. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
10. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
11. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
12. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
13. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.1.2.5. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegitan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
9. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
10. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
11. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
12. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
13. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekomomian;
14. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
15. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
16. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
17. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
18. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
19. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
20. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
21. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
22. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
23. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.1.2.6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
7. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
8. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
9. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
10. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.1.2.7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
9. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
10. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Bontomanai**

**C A M A T**

**SEKRETARIS CAMAT**

**KA. SUBAG**

**UMUM, KEPEGAWAIAN, & HUKUM**

**KA. SUBAG**

**PROGRAM DAN KEUANGAN**

**SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

**SEKSI**

**TRANTIBUM**

**D E S A**

**D E S A**

**D E S A**

**SEKSI**

**P M D**

**SEKSI**

**EKBANG**

**SEKSI**

**KESOS**

Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Bontomanai sesuai Peraturan Daerah Nomor\_4 Tahun 2020

**2.2. Sumber Daya Kecamatan Bontomanai**

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Bontomanai didukung oleh 36 ( Tiga Puluh Enam ) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.2.1, Tabel 2.2.2, Tabel 2.2.3 dan Tabel 2.2.4 berikut ini.

***Tabel 2.2.1***

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Berdasarkan Struktural**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tingkat Jabatan** | **Jumlah** |
| Eselon III A | 1 orang |
| Eselon III B | 1 orang |
| Eselon IV A | 4 orang |
| Eselon IV B | 2 orang |
| Staff\*) | 28 orang |
| **Jumlah** | **36 orang** |

\*Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2020*

***Tabel 2.2.2***

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Berdasarkan Golongan Ruang**

|  |  |
| --- | --- |
| **Golongan Ruang** | **Jumlah** |
| IV | 1 orang |
| III | 10 orang |
| II | 8 orang |
| PHL | 17 orang |
| THL | - orang |
| **Jumlah** | **36 orang** |

***Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2020***

***Tabel 2.2.3***

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah** |
| S2 | 1 orang |
| S1 | 11 orang |
| Diploma IV | - |
| Diploma III | - |
| SMU | 25 orang |
| SMP | - |
| **Jumlah** | **36 orang** |

***Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2020***

***Tabel 2.2.4***

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pendidikan Penjenjangan** | **Jumlah** |
| Diklat Pim II | 1 orang |
| Diklat Pim III | 1 orang |
| Diklat Pim IV | 4 orang |
| **Jumlah** | 6 orang |

***Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2020***

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Bonomanai meliputi gedung kantor dan perlengkapannya.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Bontomanai disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Barang / Nama Barang | tahun pembeli an | Asal usul | Keterangan | |
| Jumlah | Kondisi |
| 1 | Mesin Ketik Manual Standar | 1997 | Pembelian | 1 | RB |
| 2 | Lemari Kayu 2 Pintu | 1997 | Pembelian | 1 | B |
| 3 | Peta Kecamatan | 1997 | Pembelian | 1 | RB |
| 4 | Kursi Kayu/Rotan/Kursi Kayu Pakai Plastik | 1997 | Pembelian | 4 | B |
| 5 | Meja Biro | 1997 | Pembelian | 1 | B |
| 6 | Meja kerja | 1997 | Pembelian | 1 | B |
| 7 | Meja kerja | 1997 | Pembelian | 1 | B |
| 8 | Meja kerja | 1997 | Pembelian | 1 | B |
| 9 | Meja kerja | 1997 | Pembelian | 1 | B |
| 10 | Meja kerja | 1997 | Pembelian | 1 | B |
| 11 | Meja kerja | 1997 | Pembelian | 1 | B |
| 12 | Mesin Hitung | 2001 | Pembelian | 1 | RB |
| 13 | Rak Buku | 2001 | Pembelian | 1 | B |
| 14 | Lemari Kaca | 2001 | Pembelian | 1 | B |
| 15 | Mesin Ketik Manual Standar | 2002 | Pembelian | 1 | RB |
| 16 | Tempat Tidur/Resban | 2002 | Pembelian | 1 | RB |
| 17 | Meja Rapat | 2002 | Pembelian | 3 | B |
| 18 | Kursi Tamu | 2002 | Pembelian | 4 | B |
| 19 | Jam Dinding | 2002 | Pembelian | 1 | RB |
| 20 | Papan Instansi Kecamatan | 2002 | Pembelian | 1 | RB |
| 21 | PC Unit Komputer | 2002 | Pembelian | 1 | RB |
| 22 | Meja Tamu Pakai Kaca | 2002 | Pembelian | 1 | B |
| 23 | Tanah Kantor Pemerintah | 2003 | Pembelian |  | B |
| 24 | Tanah Kantor Pemerintah | 2003 | Pembelian |  | B |
| 25 | Kabel Sambungan Mic | 2003 | Pembelian | 30 | B |
| 26 | Kursi Issabel Tinggi | 2003 | Pembelian | 5 | B |
| 27 | Kursi Issabel Pendek | 2003 | Pembelian | 5 | RB |
| 28 | Kursi Besi Lipat | 2003 | Pembelian | 40 | B |
| 29 | Kursi Biasa/Kursi Plastik | 2003 | Pembelian | 60 | B |
| 30 | Rak Plastik 4 Susun | 2003 | Pembelian | 5 | KB |
| 31 | Rak Plastik 4 Susun | 2003 | Pembelian | 5 | KB |
| 32 | Rak Plastik 4 Susun | 2003 | Pembelian | 5 | KB |
| 33 | Rak Plastik 4 Susun | 2003 | Pembelian | 5 | KB |
| 34 | Rak Plastik 4 Susun | 2003 | Pembelian | 5 | KB |
| 35 | Loudspeaker Tinggi | 2003 | Pembelian | 2 | RB |
| 36 | PC Unit Komputer | 2003 | Pembelian | 1 | RB |
| 37 | Microphone | 2003 | Pembelian | 2 | B |
| 38 | Loudspeaker/Corong | 2003 | Pembelian | 1 | B |
| 39 | Tiang Mic Tinggi | 2003 | Pembelian | 2 | KB |
| 40 | Tiang Mic Duduk | 2003 | Pembelian | 2 | KB |
| 41 | Amplifier | 2003 | Pembelian | 1 | B |
| 42 | Loudspeaker/Corong Besar | 2003 | Pembelian | 1 | B |
| 43 | Wireless | 2003 | Pembelian | 1 | B |
| 44 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 2004 | Pembelian | 1 | B |
| 45 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 2003 | Pembelian | 1 | B |
| 46 | Tugu Titik Kontrol /Tugu/Tanda Batas | 2004 | Pembelian |  | B |
| 47 | Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua | 2005 | Pembelian | 1 | RB |
| 48 | Tugu Titik Kontrol /Tugu/Tanda Batas | 2006 | Pembelian | 1 | B |
| 49 | Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua | 2007 | Pembelian | 1 | B |
| 50 | Lemari Arsip Dinamis | 2007 | Pembelian | 1 | B |
| 51 | Lap Top | 2007 | Pembelian | 1 | RB |
| 52 | Kamera Digital | 2007 | Pembelian | 1 | RB |
| 53 | Sound System | 2007 | Pembelian | 1 | RB |
| 54 | Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua | 2008 | Pembelian | 1 | B |
| 55 | Rak Besi 3 Susun | 2008 | Pembelian | 2 | B |
| 56 | Tempat Tidur/Resban | 2008 | Pembelian | 1 | KB |
| 57 | Meja Makan | 2008 | Pembelian | 1 | B |
| 58 | Sofa | 2008 | Pembelian | 1 | B |
| 59 | Lap Top | 2008 | Pembelian | 2 | RB |
| 60 | Meja Kerja | 2008 | Pembelian | 1 | B |
| 61 | Handy Cam | 2008 | Pembelian | 1 | RB |
| 62 | Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua | 2009 | Pembelian | 1 | B |
| 63 | Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua | 2009 | Pembelian | 1 | B |
| 64 | Alat Kantor Lain-lain/Lemari | 2009 | Pembelian | 1 | RB |
| 65 | Alat Kantor Lain-lain/Lemari | 2009 | Pembelian | 1 | KB |
| 66 | Lemari Kayu | 2009 | Pembelian | 1 | B |
| 67 | Lemari kayu | 2009 | Pembelian | 1 | RB |
| 68 | Kursi Kerja | 2009 | Pembelian | 1 | B |
| 69 | Televisi | 2009 | Pembelian | 1 | B |
| 70 | Note Book | 2009 | Pembelian | 1 | RB |
| 71 | Serial Printer | 2009 | Pembelian | 1 | RB |
| 72 | Audio Monitor Activ | 2009 | Pembelian | 1 | RB |
| 73 | Meja Kerja | 2009 | Pembelian | 1 | B |
| 74 | Keyboard | 2009 | Pembelian | 1 | B |
| 75 | CPU | 2011 | Pembelian | 1 | RB |
| 76 | Monitor | 2011 | Pembelian | 1 | RB |
| 77 | Mesin Ketik | 2012 | Pembelian | 1 | B |
| 78 | Mesin Pemotong Rumput | 2012 | Pembelian | 1 | B |
| 79 | AC Split | 2012 | Pembelian | 1 | B |
| 80 | Lap Top | 2012 | Pembelian | 1 | RB |
| 81 | CPU | 2012 | Pembelian | 1 | RB |
| 82 | Kamera Digital | 2012 | Pembelian | 1 | RB |
| 83 | Mixer PVC | 2012 | Pembelian | 1 | B |
| 84 | Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 85 | Kursi Tamu | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 86 | Kursi Tamu | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 87 | Kursi Tamu | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 88 | Kursi Tamu | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 89 | Kursi Tamu | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 90 | Kursi Tamu | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 91 | Kursi Tamu | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 92 | Kursi Tamu | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 93 | Kursi Deltar/Kursi Putar | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 94 | Kursi Deltar/Kursi Putar | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 95 | Meja Komputer | 2013 | Pembelian | 2 | B |
| 96 | Tenda terowongan | 2013 | Pembelian | 1 Petak | B |
| 97 | Televisi Led | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 98 | Braket | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 99 | Resiver | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 100 | Parabola | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 101 | Lap Top | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 102 | Printer Cetak | 2013 | Pembelian | 1 | RB |
| 103 | Printer | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 104 | Mouse Wireless | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 105 | 10 Port HUB USB 2.0 | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 106 | Meja Kerja 1 Biro | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 107 | Meja Kerja 1 Biro | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 108 | Meja Kerja 1/2 Biro | 2013 | Pembelian | 2 | B |
| 109 | Speaker Aktif | 2013 | Pembelian | 1 | B |
| 110 | Lap Top | 2014 | Pembelian | 1 | B |
| 111 | Lap Top | 2014 | Pembelian | 1 | B |
| 112 | Kamera Digital | 2014 | Pembelian | 1 | B |
| 113 | Kursi Tamu | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 114 | Kursi Tamu | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 115 | Springbad | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 116 | Mimbar/Podium | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 117 | Komputer | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 118 | Komputer | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 119 | Komputer | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 120 | Komputer | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 121 | Printer | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 122 | Printer | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 123 | Printer | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 124 | Printer | 2015 | Pembelian | 1 | B |
| 125 | Lemari | 2016 | Pembelian | 1 | B |
| 126 | Kipas Angin | 2016 | Pembelian | 2 | B |
| 127 | Kamera | 2016 | Pembelian | 1 | B |
| 128 | Sound System | 2016 | Pembelian | 1 | B |
| 129 | LCD Projector | 2016 | Pembelian | 1 | B |
| 130 | Printer | 2016 | Pembelian | 1 | B |
| 131 | Mesin Potong Rumput | 2016 | Pembelian | 1 | B |
| 132 | Meja Rapat | 2016 | Pembelian | 1 | B |
| 133 | Lap Top | 2017 | Pembelian | 1 | B |
| 134 | Printer Inkjet | 2017 | Pembelian | 1 | B |
| 135 | Printer Laserjet | 2017 | Pembelian | 1 | B |
| 136 | Toner Cartridge | 2017 | Pembelian | 2 | B |
| 137 | Lemari Arsip Dinamis | 2017 | Pembelian | 1 | B |
| 138 | Meja Rapat | 2017 | Pembelian | 2 | B |
| 139 | Kursi Pimpinan | 2017 | Pembelian | 1 | B |
| 140 | Kursi Pimpinan | 2017 | Pembelian | 1 | B |
| 141 | AC 2 PK | 2017 | Pembelian | 2 | B |
| 142 | AC 1/2 PK | 2017 | Pembelian | 2 | B |
| 143 | Printer Laserjet | 2018 | Pembelian | 1 | B |
| 144 | Printer Laserjet | 2018 | Pembelian | 1 | B |
| 145 | Mesin Absensi | 2018 | Pembelian | 1 | B |
| 146 | Laptop | 2018 | Pembelian | 1 | B |
| 147 | Printer Inkjet | 2019 | Pembelian | 1 | B |
| 148 | Printer Inkjet | 2019 | Pembelian | 1 | B |
| 149 | Printer Inkjet | 2019 | Pembelian | 1 | B |
| 150 | Laptop | 2019 | Pembelian | 1 | B |
| 151 | Laptop | 2020 | Pembelian | 1 | B |
| 152 | Printer Inkjet | 2020 | Pembelian | 1 | B |
| 153 | Printer Inkjet | 2020 | Pembelian | 1 | B |
| 154 | Printer Inkjet | 2020 | Pembelian | 1 | B |

**2. 3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontomanai**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bontomanai berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama , sasaran/target Renstra Kecamatan Bontomanai periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bontomanai dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Bontomanai ini mengacu pada hasil kerja .

Tabel 2.3.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Bontomanai Tahun 2016-2021 (TC.23)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya | Terget Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian Pada tahun ke- | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Jumlah RK tertib administrasi |  | Jumlah RK yang melaksanakan tertib administrasi |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20% | 40% | 60% | 80 % | 100% |
|  | * Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun ( profil kecamatan dan tipologi) |  | Keberadaan Profil Kecamatan |  | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
|  | * Pembinaan Desa ( Desa terbaik) |  | Pembinaan Desa |  | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | * SOP bidang pemerintahan yang tersusun |  | Keberadaan SOP bidang Pemerintahan |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan |  | Keberadaan SOP bidang Administrasi |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
|  | * Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun |  | Dokumen Tupoksi, ABK, Anjab |  | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 dok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
|  | * Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam setahun |  | Peningkatan Kedisiplinan PNS |  | 90 % | 92 % | 93 % | 94 % | 95 % | 87 % | 89 % | 91 % | 93 % | 94 % | 96,67 % | 96,74 % | 97,85 % | 98,94 % | 98,95 % |
| 3 | Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * % wajib KTP yang memilki KTP |  | Identitas kependudukan |  | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % | 94 % | 89 % | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % | 98,89 % | 98,90 % | 98,91 % | 98,92 % | 98,94 % |
|  | * Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun |  | Keberadaan SOP bidang Pelayanan |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Terbinanya kader POSYANDU dan PKK |  | Pembinaan kader Posyandu |  | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 2 keg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |
|  | * % sekolah yang menerapkan UKS |  | Sekolah yang ada UKS |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | * Jumlah insiden akibat konflik agama |  | Toleransi antar umat beragama |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
|  | * Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan |  | Bantuan rumah ibadah |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 5 | Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Jumlah UKM yang aktif |  | Pembinaan UKM |  | 10 UKM | 10 UKM | 10 UKM | 10 UKM | 10 UKM | 6 UKM | 7 UKM | 8 UKM | 9 UKM | 10 UKM | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
|  | * Jumlah Koperasi aktif |  | Pembinaan Koperasi |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
|  | * SOP bidang EKBANG tersusun |  | Keberadaan SOP Ekbang |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | * Jumlah program kemitraan yang terjalin |  | Pembinaan kemitraan UKM |  | 1 prog | 1 prog | 1 prog | 1 prog | 1 prog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dam aman dalam kehidupan bermasyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * % penurunan pelanggaran K3 |  | Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan |  | 20 % | 20 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
|  | * % penurunan illegal logging |  | Pencegahan Illegal Loging |  | 30 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
|  | * % penurunan illegal fishing |  | Pencegahan Illegal Fishing |  | 10 % | 9 % | 8 % | 7 % | 5 % | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
|  | * SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun |  | Keberadaan SOP Trantibun |  | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 SOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |

Tabel 2.3.2 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Bontomanai tahun 2016-2021 (TC.24)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uraian | Anggaran Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| Belanja Kecamatan Bontomanai | **12.450.200.000** | **12.205.200.000** | **12.184.200.000** | **10.147.876.707** | **2.385.135.726** | **11.431.130.907** | **11.085.788.078** | **11.709.674.382** | **9.913.922.584** | **2.222.770.009** | **91,81%** | **90,83%** | **96,11%** | **97,70%** | **93,19%** | **( 0,96)**  **%** | **(0,95)**  **%** |
| 1.     Belanja Tidak Langsung | **11.800.200.000** | **11.405.200.000** | **11.367.200.000** | **9.209.710.307** | 1.873.680.000 | **10.785.754.086** | **10.539.899.221** | **10.894.264.987** | **9.126.938.675** | **1.711.702.242** | **91.40%** | **92,41%** | **96,10%** | **99,10%** | **91,36%** | **( 0,96 )**  **%** | **( 0,96 )**  **%** |
| a.     Belanja Pegawai | **11.800.200.000** | **11.405.200.000** | **11.367.200.000** | **9.209.710.307** | 1.873.680.000 | **10.785.754.086** | **10.539.899.221** | **10.894.264.987** | **9.126.938.675** | **1.711.702.242** | **91.40%** | **92,41%** | **96,10%** | **99,10%** | **91,36%** | **( 0,96 )**  **%** | **( 0,96 )**  **%** |
| b.    Belanja Hibah | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |
| 2.     Belanja Langsung | **650.000.000** | **800.000.000** | **817.000.000** | **938.166.400** | **690.135.726** | **645.376.821** | **795.088.857** | **815.409.395** | **937.443.909** | **689.747.767** | **99,29%** | **99,39%** | **99,81%** | **99,92%** | **99,94%** | **(0,73)**  **%** | **( 0,73)**  **%** |
| a.    Belanja Pegawai | **187.945.000** | **249.200.000** | **100.200.000** | **150.460.000** | **178.680.000** | **187.945.000** | **249.200.000** | **100.100.000** | **150.460.000** | **178.680.000** | **95,07%** | **100%** | **99,90%** | **100%** | **100%** | **( 0,76 )**  **%** | **( 0,76 )**  **%** |
| b.    Belanja barang dan Jasa | **415.355.000** | **491.600.000** | **697.800.000** | **770.206.400** | **488.955.726** | **410.731.821** | **490.688.857** | **696.309.395** | **769.483.909** | **488.567.767** | **98,87%** | **99,81%** | **99,79%** | **99,91%** | **99,92%** | **( 0,71 )**  **%** | **( 0,70 )**  **%** |
| c.     Belanja Modal | **46,700,000** | **59,200,000** | **19,000,000** | **17,500,000** | **22,500,000** | **46,700,000** | **55,200,000** | **19,000,000** | **17,500,000** | **22,500,000** | **100%** | **93,24%** | **100%** | **100%** | **100%** | **( 0,88 )**  **%** | **( 0,88 )**  **%** |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian

Kecamatan Bontomanai sebagai Berikut;

* + - 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi sudah mencapai target dengan indicator terlaksananya tertib administrasi di tingkat RK,keberadaan profil kecamatan,adanya desa terbaik setiap tahun yang mewakili kecamatan Bontomanai dan tersusunnya SOP bidang Pemerintahan. Namun tidak dipungkiri bahwa di tahun 2016,2017,2018 dan tahun 2019 pembinaan administrasi di tingkat RK masih belum mencapai target disebabkan SDM yang masih kurang ditambah pembinaan yang belum maksimal akibat terbatasnya anggaran.
      2. Meningkatnya kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja sudah mencapai target dengan idikator tersedianya SOP bidang administrasi umum,kepegawaian,program dan pengelolaan keuangan,tersedianya analisis tupoksi,beban kerja dan analisis jabatan serta tingkat rata – rata kehadiran Pegawai yang mencapai 98,91%.
      3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan umum atau Pelayanan Publik, sudah mencapai target dengan indicator % wajib KTP yang mencapai 98,94% dan tersusunnya SOP bidang pelayanan umum.
      4. Meningkatnya kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat sudah mencapai target dengan indicator terbinanya kader Posyandu dan pelaksanaan 10 program PKK,terlaksananya penerapan UKS disemua tingkatan sekolah,tidak ada konflik agama, dan berjalannya fasilitasi bantuan rumah ibadah 10 Masjid per tahun.
      5. Meningkatkan aktifitas UKM,produk unggulan Kecamatan,Koperasi dan BKM binaan ada yang sudah memenuhi target dan ada yang belum dengan indicator pembinaan UKM tahun 2016,2017,2018 dan 2019 belum mencapai target namun di 2020 sudah tercapai. Pembinaan Koperasi baru mencapai 50% sampai tahun 2020 ini disebabkan terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan pelatihan dan terbatasnya akses informasi sehingga jumlah program kemitraan yang terjalin juga sangat terbatas.Untuk penyusunan SOP Ekbang sudah tersusun.
      6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat sudah mencapai target dengan indicator penurunan pelanggaran K3, penurunan illegal logging dan penurunan illegal fishing yang mencapai 100%, walau tidak dipungkiri bahwa target yang dipatok masih tergolong rendah akibat terbatasnya anggaran.
      7. Berdasarkan tebel 2.3.2. rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Bontomanai, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Bontomanai berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara ekplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan.Terjadinya ( - ) dalam rata – rata pertumbuhan anggaran dan realisasi karena pengurangan anggaran belanja tidak langsung akibat pengalihan belanja pegawai guru – guru ASN yang bertugas di wilayah Kecamatan Bontomanai ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. **4. Analisis, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**
   * 1. **Analisis Renstra K/L dan Kemendagri**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaat pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatas dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun factor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada dirjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkatkan kualitas administrasi birokratif daerah khususnya Kecamatan Bonomanai.

**2.4.2 Analisis Renstra Propinsi Sulawesi Selatan**

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepiulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);

2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;

3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

**2.4.3. Analisis RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar**

kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulaluan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

**2.4.4. Analisis KLHS**

Dalam KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan

pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas perkebunan yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimitasi,erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

**2.4.5. Tantangan**

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Bontomanai dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Insfrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai

Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Bontomanai sudah dilalukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namum daya yang masih terbatas jangkauan dan gangguan jaringan kabel sehingga membuat jaringan listrik tidak stabil.

1. Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi

Sebagai kecamatan yang memiliki 10 desa dengan topografi perbukitan, ketersediaan sarana transportasi merupakan hal yang urgen untuk disediakan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi, menyebabkan aparat pemerintah yang bertugas di Kecamatan Bontomanai dalam melakukan koordinasi dan pengawasan kerapa kali mengalami tantangan tersendiri di lapangan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Bontomanai, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi guna mendukung aksesibilitas pengawasan melekat dalam wilayah Kecamatan Bontomanai.

1. Sistem Pertanian Masyarakarat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekononiam yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Bontomanai. Hal ini berimbas pada sector pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Bontomanai secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi dan akses jalan tani yang menghambat pemasaran hasil pertanian. Modal transportasi yang ada dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat petani dengan margin keuntungan yang juga relative kecil.

1. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitasi ketenaga kerjaan yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

1. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai kecamatan yang memiliki wilayah perbukitan dan pantai barat maupun timur menjadikan Kecamatan Bontomanai berpotensi mengembangkan sumber daya alam di darat dan laut. Tantangan pengelolaan sumber daya laut yang belum optimal karena masyarakat nelayan Bontomanai masih Kekurangan armada penangkapan ikan , itupun yang ada masih bersifat tradisonal ditambah lagi jangkauan ke pantai timur masih sulit diakses meyebabkan potensi perikanan dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Bontomanai.

Potensi pertanianpun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam pengelolaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya menjadikan pertanian untuk kebutuhan pemenuhan keluarga saja.

Potensi pariwisata Kampung Penyu juga masih terkendala abrasi pantai dan kiriman sampah di musim Barat yang belum mendapatkan solusi untuk penanggulangannya sampai saat ini.

* + 1. **Peluang**

Sebagaimana disetiap tantangan maka akan ada peluang yang bisa menjadi potensi pengembangan, berikut adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang yang dimiliki Kecamatan Bonomanai :

1. Peluang pengembangan pembangunan dari Restra K/L, RTRW, KLHS, Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang selayar dengan perencanaan pengembangan di wilayah Kecamatan Bonomanai, khususnya pada sektor kemaritiman.
2. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang masih melimpah dengan nilai jual yang baik di pasar global. Untuk produk perkebunan, cengkeh,pala,vanili,jambu mente,kopra dan porang memliki peluang yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan Kecamatan Bontomanai merupakan salah satu penyuplai hasil perkebunan terbesar di Kabupaten Kepulauan Selayar
3. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja yang menggunakan aktifitas fisik yang kuat yang cukup tersedia.
4. Letak wilayah Kecamatan Bontomanai yang diapit 2 Kecamatan daratan dibagian Utara dan 3 Kecamatan daratan dibagian Selatan , hal ini bisa dikembangkan menjadi pusat perdagangan barang dan jasa.
5. Terdapat beberapa lokasi dengan potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik secara local maupun global. Potensi keindahan Puncak Tanadoang,Pantai Timur dan Kampung Penyu yang dapat dikembangkan untuk paket pariwisata.
6. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis potensi ekonomi daerah dimana dalam area poros maritim letak Kepulauan Selayar yang berada di pertengahan wilayah Republik Indonesia, dapat dikembangkan menjadi pusat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 – 2026. Dengan 3 Pilar dan 1 Program Unggulan :

***3 Pilar :***

***Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata***

***Kawasan Industri Perikanan Terpadu***

***Kawasan Distribusi Barang dan Jasa***

***1 Program Unggulan :***

***GERBANG SARI ; Gerakan Membangun Desa Mandiri***

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOMANAI**

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat maka Kecamatan Bontomanai merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan yang melibatkan pihak Kecamatan tersebut, tentunya ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang perlu diidentifikasi.

**3. 1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan** **Bontomanai**

* + 1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik maka Kecamatan Buki harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, akurat, berdasarkan prosedur serta aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Masih belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat ini disebabkan SDM aparatur yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas serta terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran.

* + 1. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan

Peran serta dan swadaya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang belum optimal ini disebabkan telah terjadinya pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan ke arah individualisme yang menyebabkan semakin berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksaanaan pembangunan. Selain itu gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan juga belum optimal pelaksanaannya.

* + 1. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat.

Peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat belum optimal ini disebabkan telah terjadinya Kurangnya koordinasi masyrakat ke kantor camat untuk dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang menyangkut kelembagaan masyarakat.

* + 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hokum.

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Bontomanai secara umum dapat dikatakan cukup aman dan terkendali namun masih terjadi beberapa permasalahan dalam masyarakat khususnya konflik pertanahan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi hukum yang menyangkut hak kepemilikan dan pengelolaan tanah pribadi maupun tanah warisan keluarga yang tentunya membutuhkan penanganan serius dari stakeholder terkait.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Darah

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat | Masih belum meratanya pelayanan terhadap masyarakat | * SDM yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas * Sarana, prasarana dan anggaran yang masih terbatas |
| 2. | Belum optimalnya peran serta dan Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah | Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan |
| 3. | Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat | Kurangnya Koordinasi masyarakkat | Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kelembagaan Masyarakat |
| 4. | Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum | Masih terjadinya konflik-konflik sosial kemasyarakatan di desa | Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kepentingan umum |

1. **2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan Selayar**

**Terpilih 2021 - 2026**

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Bontomanai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

***“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.***

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”

2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”

3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;

2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;

3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan

4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanaan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutaan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauaan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutaan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :

a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.

b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.

c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng –

Jampea.

d Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.

e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

a. Tersedianya lahan untuk kawasan.

b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.

c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.

d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.

e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan

2. Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.

b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.

c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.

d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.

e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.

f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.

g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus ( KEK ) pariwisata.

b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.

c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.

d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :

a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.

b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.

c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.

d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.

e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

a. Tersedianya lahan untuk kawasan.

b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.

c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.

d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.

e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbangsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

**3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi Sulawesi Selatan**

3.3.1 Telaahan Renstra K/L Kementrian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaat pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatas dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun factor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada dirjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkatkan kualitas administrasi birokratif daerah khususnya Kecamatan Bonomanai.

3.3.2 Telaahan Renstra perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulwesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepiulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);

2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;

3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

**3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.**

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulaluan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;

b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;

c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana

d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;

e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;

f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;

g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan

h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;

i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan

j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.

k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten

l. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

(1) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, terdiri atas :

a. Mengembangan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng dan Pamatata,

b. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL Promosi (PKLp) yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;

c. Menjalin kerjasama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

d. Mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara nasional.

e. Mengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;

f. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

g. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.

(2) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, terdiri atas :

a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;

b. Mengembangkan integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;

c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan

d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan, dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;

(3) Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, terdiri atas :

a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;

b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan

c. Menyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

(4) Strategi pelaksanaan kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung, terdiri atas :

a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;

b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;

c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;

d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan

e. Memfasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.

(5) Strategi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, terdiri atas :

a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;

b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat / hutan hak; dan

c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).

(6) Strategi pelaksanaan kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, terdiri atas :

a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;

b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;

c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan

d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

(7) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, terdiri atas :

a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);

b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan

c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

(8) Strategi melaksanakan pengembangan pusat kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata, terdiri atas :

a. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor;

b. Memprioritaskan program jangka pendek (quick win) yang mampu memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan

c. Menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta.

(9) Strategi pelaksanaan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, terdiri atas :

a. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng,

b. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan

c. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.

(10) Strategi pelaksanaan pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional, terdiri atas :

a. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate.

b. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya.

c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

d. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.

(11).Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, terdiri atas :

a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Selayar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;

b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;

c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;

d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;

e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;

f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;

g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari Pulau-Pulau tetangga dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan;

h. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan kaeadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

(12). Peningkatan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten, terdiri atas :

a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;

d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibu kota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru. Dengan adanya tambahan dua PKLp diharapkan jangkauan pelayanan pusat-pusat kegiatan tersebut dapat lebih efektif. Skala pelayanan PKL dan PKLp masing-masing meliputi beberapa kecamatan sehingga dengan adanya keempat pusat kegiatan ini, jangkauan pelayanannya dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

* + 1. **Telaahan Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.**

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas perkebunan yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimitasi,erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

* + - 1. Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 2012 – 2032.
      2. Faktor penghambat antara lain adalah :
         1. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang pemukiman dan pengelolaan tambang.
         2. Tidak tersedianya tenaga teknis.
         3. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

**.3. 5. Penentuan Isu-Isu Stategis**

Dari hasil telaahan berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

1. Analisis Lingkungan Internal
2. Kekuatan

* Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
* Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan.
* Potensi pengembangan sektor pariwisata yang prosfektif terutama pengembangan obyek wisata puncak Tanadoang dengan konsep mengintegrasikan wisata alam dan agrowisata dalam satu kawasan wisata.

1. Kelemahan

* Ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
* Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.
* Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun desa yang berorintasi pada pengembangan potensi pertanian,perikanan,pariwisata juga potensi perkebunan dll.
* Masih terbatasnya fasilitas kerja.
* Alokasi anggaran kecamatan yang relative masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah, beban, dan volume kerja serta resiko dalam melaksanakan tugas kedinasan.
* Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.

1. Analisis Lingkungan Eksternal
2. Peluang

* Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.
* Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.
* Potensi investasi yang relative besar dan prosfektif terutama di sektor perdagangan (distribusi barang), perikanan dan pariwisata .
* Letak wilayah yang diapit 2 Kecamatan dibagian Utara ( Buki,Bontomatene ) dan 3 Kecamatan dibagian Selatan ( Benteng,Bontoharu,Bontosikuyu ), hal ini bisa dikembangkan menjadi pusat perdagangan barang dan jasa.

1. Tantangan

* Kondisi geografis Kecamatan Bontomanai yang wilyahnya sebagaian besar adalah perbukitan merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur Kecamatan,Desa dan pelaksana aparatur lainnya dalam menjalankan tupoksi masing-masing.
* Insfrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai. Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Bontomanai sudah dilalukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namum masih terkendala jaringan yang sering mengalami gangguan.
* Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi : kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, gudang produksi, pangan, dan infrastruktur perikanan.
* Sistem Pertanian Masyarakarat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem
* Kegiatan perekononiam yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Bontomanai. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Bontomanai secara umum.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bonomanai

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauaan Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Bontomanai 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :

* 1. Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Bontomanai, dengan sasaran berikut ini :
* Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
* Meningkatnya Nilai SAKIP
* Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan laporan keuangan pemerintahan Kecamatan sesuai SAP.

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:

a. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Bontomanai, dengan sasaran berikut ini :

* Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
* Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki tujuan pembangunan:

1. Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social di Kecamatan Bontomanai,dengan sasaran :

● Meningkatnya tatanan kehidupan social masyarakat

, b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kegamaan di Kecamatan Bontomanai dengan sasaran :

* Meningkatnya toleransi kehidupan social kemasyarakatan di Kecamatan Bontomanai.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bontomanai tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontomanai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan  (M-1) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 70% | 72.5% | 75% | 80% | 85% |
| Meningkatnya Nilai SAKIP | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 60 | 65 | 70 | 75 | 80.0 |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 2. | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M-2) | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | % Meningkatnya Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa | % Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M-5) | Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial | Indeks Ketahanan Sosial | 0,6900 | 0,7000 | 0,7100 | 0,7150 | O,7150 |
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan | Angka Kriminalitas | 9,50 | 8,75 | 8,25 | 7,50 | 6,50 |

Tabel 4.2. Perubahan Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Bontomanai.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Tujuan/Sasaran** | **Target Kinerja Sasaran Pada Tahun** | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Bontomanai |  | Indeks Reformasi Birokrasi | 55 | 64 | 68 | 73 | 76 |
| Meningkatnya Nilai Sakip Kecamatan | Nilai Sakip Kecamatan Bontomanai | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Laporan Keuangan Kecamatan Bontomanai sesuai SAP | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai | sesuai |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bontomanai | 70% | 72.50 % | 75 % | 80 % | 85 % |
| 2 | Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Bontomanai |  | Indeks Desa Membangun | 0,6900 | 0,7000 | 0,7100 | 0,7150 | 0,7300 |
| Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan | 63 % | 66 % | 70 % | 71 % | 73 % |
| Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa | Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Bontomanai |  | Indeks Ketahanan Sosial | 0,6300 | 0,6650 | 0,7000 | 0,7150 | 0,7300 |
| * Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat | Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan | 69% | 70% | 71% | 71,5% | 73% |
| 4 | Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Bontomanai |  | Indeks Kesalehan Sosial | 63 | 65,15 | 67,30 | 70 | 75 |
| * Meningkatnya toleransi Kehidupan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontomanai | Tingkat toleransi di Kecamatan | 65% | 66% | 68% | 72% | 77% |

# 4.3. Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bontomanai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bontomanai mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang di mana Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026 yakni :

## *“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”*

1. Misi

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bontomanai yaitu Misi ke-1,2, dan 5 yakni;

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (M1)
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M2)
3. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M5)

Dari Misi ke-1,2,dan 5 ini maka tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan data tabel 4.1. mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsun untuk menunjang tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Bontomanai untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Bontomanai

Sasaran :a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

b. Meningkatnya Nilai SAKIP

c. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kecamatan sesuai SAP

Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan di Kecamatan Bontomanai

Sasaran :a. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa

b. Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa

Tujuan : Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social di Kecamatan Bontomanai

Sasaran: Meningkatnya tatanan kehidupan social masyarakat

Tujuan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Bontomanai

Sasaran :Meningkatnya toleransi kehidupan social kemasyarakatan di Kecamatan Bontomanai

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bontomanai adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bontomanai diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bontomanai menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontomanai.

a. Strategis

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Bontomanai yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Bontomanai agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan Reformasi Birokrasi Daerah | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan | Menigkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik. | Peningkatan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur |
| Meningkatnya Nilai SAKIP | Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Hasil | Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku |  |
| 2 | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa | Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari |
| Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa | Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan | Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembagkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari |
| 3 | Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan | Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial | Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia | Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat. |
| Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan | Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan |

Tabel 5.2. Perubahan Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur** | | | |
| **MISI 1: Mengembangkan Tatakelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.** | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Bontomanai | Meningkatnya Nilai Sakip Kecamatan | Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Hasil | Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur |
| Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kecamatan sesuai SAP | Meningkatkan SDM Aparatur, efesiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran | Peningkatan kulitas SDM aparatur melalui Diklat |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat | Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik. | Peningkatan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur |
| **MISI 2 : Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan** | | | |
| Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Bontomanai | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa | Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari |
| Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan | Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari |
| **MISI 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan keagamaan** | | | |
| Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan Bontomanai | Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat | Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia | Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat. |
| Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Bontomanai | Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Kecamatan Bontomanai | Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia | Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontomanai di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/sub kegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

* + Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  + Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  + Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  + Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  + Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  + Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  + Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

* Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
* Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
* Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
* Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
* Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
* Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

* Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
* Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD
* Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
* Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

* Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
* Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
* Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

* Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
* Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
* Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
* Penyediaan Bahan Logistik Kantor
* Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
* Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
* Fasilitasi Kunjungan Tamu
* Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

* Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
* Pengadaan Mebel
* Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
* Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

* Penyediaan Jasa Surat Menyurat
* Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
* Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

* Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
* Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
* Pemeliharaan Mebel
* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
* Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
* Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

UNSUR KEWILAYAHAN

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksaananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

* + 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan:
* Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical Terkait
* Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  + 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
* Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
* Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
* Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
  + 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
* Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
* Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
* Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

* Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
* Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
* Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Bontomanai. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

* Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
* Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontomanai. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / sub kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

* Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
* Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
* Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, bak dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

* Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
* Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
* Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
* Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
* Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
* Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
* Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
* Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
* Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Tabel 6.1.Rencana Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bontomanai 2021-2026

Kabupaten Kepulauan Selayar ( Tabel T-C.27 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **KODE** | **Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)** | | | | | **Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan** | | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja OPD Penang gung Jawab** | | **Lokasi** |
| **Tahun 1** | | | **Tahun 2** | | | | **Tahun 3** | | | **Tahun 4** | | **Tahun 5** | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra** | | |
| **2022** | | | **2023** | | | | **2024** | | | **2025** | | **2026** | |
| **Tar-get** | **Rp.** | | **Tar--get** | | **Rp.** | | **Tar-get** | | **Rp.** | **Tar-get** | **Rp.** | **Tar-get** | **Rp.** | **Tar-get** | | **Rp.** |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | | 22 |
|  | Meningkatkan Reformasi Birokrasi Daerah |  |  |  | |  |  | |  | 33,89  (C) | | 55,00  (CC) |  | | 64,00  (CC) | |  | | 68,00  (B) | |  | 73,00  (B) |  | 76,00  (A) |  | 76,00  (A) | |  |  | |  |
|  |  | Meningkatnya Nilai SAKIP |  |  | |  |  | |  | 58,85  (CC) | | 60,00  (B) |  | | 65,00  (B) | |  | | 70,00  (BB) | |  | 75,00  (BB) |  | 80,00  (A) |  | 80,00  (A) | |  |  | |  |
|  | Meningkatkan Reformasi Birokrasi Daerah |  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | 100% | 2.161.048.444 | | 100% | | 2.190.633.197 | | 100% | | 2.245.464.746 | 100% | 2.299.333.445 | 100% | 2.354.195.541 | 100% | | 2.354.195.541 |  | |  |
|  | Meningkatnya Nilai SAKIP | 7.01.01.2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Tersedianya dokumen kinerja | 10 dokumen | | 10 dokumen | 5.000.000 | | 10 dokumen | | 7.000.000 | | 10 dokumen | | 10.000000 | 10 dokumen | 20.000.000 | 10 dokumen | 23.000.000 | 10 dokumen | | 23.000.000 |  | |  |
|  | 7.01.01.2.01.01 |  |  | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun, Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan | 3 dokumen | | 3 dokumen | 5.000.000,0 | | 3 dokumen | | 7.000.000,0 | | 3 dokumen | | 10.000.000,0 | 3 dokumen | 10.000.000,0 | 3 dokumen | 11.000.000,0 | 3 dokumen | | 11.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.01.02 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun | 1 dokumen | | 1 dokumen | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | 1 dokumen | 2.500.000,0 | 1 dokumen | 3.000.000,0 | 1 dokumen | | 3.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.01.03 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun | 1 dokumen | | 1 dokumen | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | 1 dokumen | 2.500.000,0 | 1 dokumen | 3.000.000,0 | 1 dokumen | | 3.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.01.04 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah Dokumen DPA Pokok yang tersusun | 1 dokumen | | 1 dokumen | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | 1 dokumen | 2.500.000,0 | 1 dokumen | 3.000.000,0 | 1 dokumen | | 3.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.01.05 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun | 1 dokumen | | 1 dokumen | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | 1 dokumen | 0,0 | 1 dokumen | 0,0 | 1 dokumen | | 0,0 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.01.06 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan | 3 dokumen | | 3 dokumen | 0,0 | | 3 dokumen | | 0,0 | | 3 dokumen | | 0,0 | 3 dokumen | 2.500.000,0 | 3 dokumen | 3.000.000,0 | 3 dokumen | | 3.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.01.07 |  |  | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan dilaporkan |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Daerah | 7.01.01.2.02. |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | **Persentase pemenuhan administrasi keuangan** | **100 %** | | **100 %** | **1.731.208.444** | | **100 %** | | **1.740.273.197** | | **100 %** | | **1.750.464.746** | **100 %** | **1.762.433.445** | **100 %** | **1.772.695.541** | **100 %** | | **1.772.695.541** |  | |  |
|  | 7.01.01.2.02.01 |  |  | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan | 36 orang | | 36 orang | 1.724.208.444 | | 36 orang | | 1.733.273.197 | | 36 orang | | 1.740.464.746 | 36 orang | 1.750.333.445 | 36 orang | 1.760.195.541 | 36 orang | | 1.760.195.541 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.02.02 |  |  | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan administrasi |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.02.03 |  |  | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.02.04 |  |  | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | Jumlah dokumen Neraca Keuangan yang disusun dan dilaporkan |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.02.05 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan | 1 dokumen | | 1 dokumen | 7.000.000 | | 1 dokumen | | 7.000.000 | | 1 dokumen | | 10.000.000 | 1 dokumen | 10.000.000,00 | 1 dokumen | 10.000.000,00 | 1 dokumen | | 10.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.02.06 |  |  | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | Jumlah dokumen tanggapan LHP yang disusun dan dilaporkan |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.02.07 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan | 12 kali 4 dokumen | | 12 kali 4 dokumen | - | | 12 kali 4 dokumen | | 0 | | 12 kali 4 dokumen | | 0 | 12 kali 4 dokumen | 2.100.000,00 | 12 kali 4 dokumen | 2.500.000,00 | 12 kali 4 dokumen | | 2.500.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.02.08 |  |  | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun dan dilaporkan |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.03 |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | **Persentase pemenuhan administrasi Barang Milik Daerah** | **100 %** | | **100 %** | **0,0** | | **100 %** | | **0,0** | | **100 %** | | **1.500.000,0** | **100 %** | **2.500.000,0** | **100 %** | **3.000.000,0** | **100 %** | | **3.000.000,0** |  | |  |
|  | 7.01.01.2.03.01 |  |  | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan | 2 dokumen | | 1 dokumen | - | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | 1 dokumen | 0,0 | 1 dokumen | 0,0 | 1 dokumen | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.03.02 |  |  | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan | 0 dokumen | | 0 dokumen | 0,0 | | 0 dokumen | | 0,0 | | 0 dokumen | | 0,0 | 0 dokumen | 0,0 | 0 dokumen | 0,0 | 0 dokumen | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.03.03 |  |  | | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan | 0 dokumen | | 0 dokumen | 0,0 | | 0 dokumen | | 0,0 | | 0 dokumen | | 0,0 | 0 dokumen | 0,0 | 0 dokumen | 0,0 | 0 dokumen | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.03.04 |  |  | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan | 0 dokumen | | 1 dokumen | - | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | 1 dokumen | 0,0 | 1 dokumen | 0,0 | 1 dokumen | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.03.05 |  |  | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan | 1 dokumen | | 1 dokumen | - | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 1.500.000,0 | 1 dokumen | 2.500.000,0 | 1 dokumen | 3.000.000,0 | 1 dokumen | | 3.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.03.06 |  |  | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan | 0 dokumen | | 0 dokumen | 0,0 | | 0 dokumen | | 0,0 | | 0 dokumen | | 0,0 | 0 dokumen | 0,0 | 0 dokumen | 0,0 | 0 dokumen | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.03.07 |  |  | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah dokumen pemanfaatan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan | 0 dokumen | | 0 dokumen | 0,0 | | 0 dokumen | | 0,0 | | 0 dokumen | | 0,0 | 0 dokumen | 0,0 | 0 dokumen | 0,0 | 0 dokumen | |  |  | |  |
|  | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan | 7.01.01.2.05. |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | **Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian** | **100 %** | | **100 %** | **10.000.000,0** | | **100 %** | | **10.000.000,0** | | **100 %** | | **33.000.000,0** | **100 %** | **25.000.000,0** | **100 %** | **47.600.000,0** | **100 %** | | **47.600.000,0** |  | |  |
|  | 7.01.01.2.05,.01 |  |  | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | Jumlah Aparat OPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.05.02 |  |  | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia | 36 pasang | | 36 pasang | - | | 36 pasang | | - | | 36 pasang | | 18.000.000 | 36 pasang | - | 40 pasang | 22.600.000 | 40 pasang | | 22.600.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.05.03 |  |  | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.05.04 |  |  | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | Jumlah sistem informasi kepegawaian yang tersedia | 1 aplikasi | | 1 aplikasi | - | | 1 aplikasi | | 0,0 | | 1 aplikasi | | 0,0 | 1 aplikasi | 5.000.000,0 | 1 aplikasi | 5.000.000,0 | 1 aplikasi | | 5.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.05.05 |  |  | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang disusun dan dilaporkan | 1 laporan | | 1 laporan | - | | 1 laporan | | 0,0 | | 1 laporan | | 0,0 | 1 laporan | 0,0 | 1 laporan | 0,0 | 1 laporan | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.05.06 |  |  | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 2 orang | | 2 orang | 10.000.000 | | 2 orang | | 10.000.000 | | 3 orang | | 15.000.000,0 | 4 orang | 20.000.000,0 | 4 orang | 20.000.000,0 | 4 orang | | 20.000.000 |  | |  |
|  | 7.01.01.2.05.07 |  |  | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.05.08 |  |  | | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.06 |  |  | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Persentase Peralatan rumah tangga yang tersedia** | **100 %** | | **100 %** | **46.487.784,0** | | **100 %** | | **50.000.000,0** | | **100 %** | | **60.000.000,0** | **100 %** | **70.000.000,0** | **100 %** | **82.500.000,0** | **100 %** | | **82.500.000,0** | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.06.01 |  |  | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | 2 jenis | | 2 jenis | - | | 2 jenis | | 0,0 | | 2 jenis | | 0,0 | 2 jenis | 0,0 | 2 jenis | 5.000.000,0 | 2 jenis | | 5.000.000 |  | |  |
|  | 7.01.01.2.06.02 |  |  | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 1 unit | | 1 unit | 5.000.000 | | 1 unit | | 5.000.000,0 | | 1 unit | | 10.000.000,0 | 1 unit | 10.000.000,0 | 1 unit | 10.000.000,0 | 1 unit | | 10.000.000 |  | |  |
|  | 7.01.01.2.06.03 |  |  | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia | 0 jenis | | 2 jenis | 0,0 | | 2 jenis | | 0,0 | | 2 jenis | | 0,0 | 2 jenis | 0,0 | 2 jenis | 0,0 | 2 jenis | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.06.04 |  |  | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia | 0 jenis | | 10 jenis | 0,0 | | 10 jenis | | 0,0 | | 10 jenis | | 0,0 | 10 jenis | 0,0 | 10 jenis | 0,0 | 10 jenis | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.06.05 |  |  | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia | 2 jenis | | 2 jenis | - | | 2 jenis | | 0,0 | | 2 jenis | | 0,0 | 2 jenis | 0,0 | 2 jenis | 0,0 | 2 jenis | | - |  | |  |
|  | 7.01.01.2.06.06 |  |  | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia | 2 jenis | | 2 jenis | - | | 2 jenis | | 0,0 | | 2 jenis | | 0,0 | 2 jenis | 0,0 | 2 jenis | 2.500.000,0 | 2 jenis | | 2.500.000 |  | |  |
|  | 7.01.01.2.06.07 |  |  | | Penyediaan Bahan/Material | | Jumlah bahan/ material yang tersedia | 0 jenis | | 2 jenis | 0,0 | | 2 jenis | | 0,0 | | 2 jenis | | 0,0 | 2 jenis | 0,0 | 2 jenis | 0,0 | 2 jenis | | - |  | |  |
|  | 7.01.01.2.06.08 |  |  | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah tamu yang fasilitasi | 10 orang | | 15 orang | - | | 15 orang | | 0,0 | | 15 orang | | 0,0 | 15 orang | 0,0 | 15 orang | 0,0 | 15 orang | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.06.09 |  |  | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara | 260 SPD | | 260 SPD | 41.487.784 | | 260 SPD | | 45.000.000,0 | | 260 SPD | | 50.000.000,0 | 260 SPD | 60.000.000,0 | 260 SPD | 65.000.000,0 | 260 SPD | | 65.000.000 |  | |  |
|  | 7.01.01.2.06.10 |  |  | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis yang disusun dan dilaporkan | 1 laporan | | 1 laporan | 0,0 | | 1 laporan | | 0,0 | | 1 laporan | | 0,0 | 1 laporan | 0,0 | 1 laporan | 0,0 | 1 laporan | | - |  | |  |
|  | 7.01.01.2.06.11 |  |  | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersedia | 1 aplikasi | | 1 aplikasi | - | | 1 aplikasi | | 0,0 | | 1 aplikasi | | 0,0 | 1 aplikasi | 0,0 | 1 aplikasi | 0,0 | 1 aplikasi | | - |  | |  |
|  | 7.01.01.2.07 |  |  | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran** | **100 %** | | **100 %** | **0,0** | | **100 %** | | **0,0** | | **100 %** | | **0,0** | **100 %** | **10.000.000,0** | **100 %** | **0,0** | **100 %** | | **0,0** | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.07.01 |  |  | | Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia | 0 unit | | 0 unit | - | | 0 unit | | 0,0 | | 0 unit | | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | | - |  | |  |
|  | 7.01.01.2.07.02 |  |  | | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia | 0 unit | | 1 unit | - | | 1 unit | | 0,0 | | 1 unit | | 0,0 | 1 unit | 0,0 | 1 unit | 0,0 | 1 unit | | - |  | |  |
|  | 7.01.01.2.07.04 |  |  | | Pengadaan Alat angkutan darat tak bermotor | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang tersedia | 0 unit | | 0 unit | 0,0 | | 0 unit | | 0,0 | | 0 unit | | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | | - |  | |  |
|  | 7.01.01.2.07.05 |  |  | | Pengadaan mebel | | Jumlah mebel yang tersedia | 0 unit | | 0 unit | 0,0 | | 0 unit | | 0,0 | | 0 unit | | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.07.06 |  |  | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | | Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia | 3 jenis | | 3 jenis | - | | 3 jenis | | 0,0 | | 3 jenis | | 0,0 | 3 jenis | 10.000.000,0 | 3 jenis | 0,0 | 3 jenis | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.07.09 |  |  | | Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia | 4 Jenis | | 4 jenis | - | | 4 jenis | | 0,0 | | 4 jenis | | 0,0 | 4 jenis | 0,0 | 4 jenis | 0,0 | 4 jenis | | - |  | |  |
|  | 7.01.01.2.07.10 |  |  | | pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia | 0 unit | | 1 unit | - | | 0 unit | | 0,0 | | 0 unit | | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | | - |  | |  |
|  | 7.01.01.2.07.11 |  |  | | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia | 0 jenis | | 1 jenis | - | | 1 jenis | | 0,0 | | 1 jenis | | 0,0 | 1 jenis | 0,0 | 1 jenis | 0,0 | 1 jenis | | - |  | |  |
|  | 7.01.01.2.08 |  |  | | **Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase pemenuhan administrasi perkantoran** | **100 %** | | **100 %** | **317.000.000,0** | | **100 %** | | **318.000.000,0** | | **100 %** | | **327.140.000,0** | **100 %** | **331.040.000,0** | **100 %** | **339.040.000,0** | **100 %** | | **339.040.000,0** |  | |  |
|  | 7.01.01.2.08.01 |  |  | | Penyediaan Jasa surat menyurat | | Jumlah ATK yang tersedia |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.01.2.08.02 |  |  | | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | | Jumlah layanan telepon,listrik dan air yang tersedia | 3 jenis layanan | | 3 jenis layanan | 7.000.000 | | 3 jenis layanan | | 7.000.000,0 | | 3 jenis layanan | | 7.140.000,0 | 3 jenis layanan | 8.040.000,0 | 3 jenis layanan | 9.040.000,0 | 3 jenis layanan | | 9.040.000 |  | |  |
|  | 7.01.01.2.08.03 |  |  | | Jumlah layanan umum kantor yang tersedia | | Jumlah layanan umum kantor yang tersedia | 6 jenis | | 7 jenis | 310.000.000 | | 7 jenis | | 311.000.000,0 | | 7 jenis | | 320.000.000,0 | 7 jenis | 323.000.000,0 | 7 jenis | 330.000.000,0 | 7 jenis | | 330.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.09 |  |  | | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | | **Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran** | **100 %** | | **100 %** | **51.360.000,0** | | **100 %** | | **65.360.000,0** | | **100 %** | | **63.360.000,0** | **100 %** | **78.360.000,0** | **100 %** | **86.360.000,0** | **100 %** | | **86.360.000,0** |  | |  |
|  | 7.01.01.2.09.01 |  |  | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan | | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | 1 unit | | 1 unit | 33.360.000 | | 1 unit | | 33.360.000 | | 1 unit | | 33.360.000,0 | 1 unit | 33.360.000 | 1 unit | 33.360.000 | 1 unit | | 33.360.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.09..02 |  |  | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara | 5 unit | | 5 unit | 18.000.000 | | 5 unit | | 18.000.000 | | 5 unit | | 18.000.000,0 | 5 unit | 18.000.000 | 5 unit | 18.000.000 | 5 unit | | 18.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.09..03 |  |  | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | Jumlah alat besar yang dipelihara | 0 unit | | 0 unit | 0,0 | | 0 unit | | 0,0 | | 0 unit | | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.09.04 |  |  | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | | Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara | 0 unit | | 0 unit | 0,0 | | 0 unit | | 0,0 | | 0 unit | | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.09.05 |  |  | | Pemeliharaan Mebel | | Jumlah mebel yang dipelihara | 5 jenis | | 3 jenis | - | | 3 jenis | | 0,0 | | 3 jenis | | 0,0 | 3 jenis | 2.000.000,0 | 3 jenis | 5.000.000,0 | 3 jenis | | 5.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.09.06 |  |  | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 2 unit | | 2 unit | - | | 2 unit | | 2.000.000,0 | | 2 unit | | 2.000.000,0 | 3 unit | 2.500.000,0 | 5 unit | 5.000.000,0 | 5 unit | | 5.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.09.07 |  |  | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | Jumlah Aset Tetap yang terpelihara | 2 unit | | 2 unit | - | | 2 unit | | 2.000.000,0 | | 2 unit | | 0,0 | 3 unit | 2.500.000,0 | 5 unit | 5.000.000,0 | 5 unit | | 5.000.000 |  | |  |
|  | 7.01.01.2.09.09 |  |  | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 2 unit | | 2 unit | - | | 2 unit | | 10.000.000,0 | | 2 unit | | 10.000.000,0 | 2 unit | 15.000.000,0 | 2 unit | 15.000.000,0 | 2 unit | | 15.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.09.10 |  |  | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 2 unit jenis | | 2 jenis | - | | 2 jenis | | 0,0 | | 2 jenis | | 0,0 | 2 jenis | 5.000.000,0 | 2 jenis | 5.000.000,0 | 2 jenis | | 5.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.01.2.09.11 |  |  | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah sarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara | 0 | | 0 | - | | 0 | | 0,0 | | 0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | | - |  | |  |
|  |  |  | 7.01.01.2.05.12 |  |  | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah | | Jumlah tanah yang dipelihara | 0 unit | | 0 unit | - | | 0 unit | | 0,0 | | 0 unit | | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | 0,0 | 0 unit | | - |  | |  |
|  |  |  | 7. | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01 | KECAMATAN | | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | **Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik** | **67%** | | **70%** | **10.000.000** | | **73%** | | **10.136.900** | | **75%** | | **10.390.627** | **80%** | **10.639.898** | **85%** | **10.893.766** | **85%** | | **10.893.766** |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.01 |  | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | **Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan,Jumlah laporan informasi kependudukan** | **6 jenis, 12 laporan** | | **6 jenis, 12 laporan** | **5.000.000** | | **6 jenis, 12 laporan** | | **5.136.900** | | **6 jenis, 12 laporan** | | **5.390.627** | **6 jenis, 12 laporan** | **5.500.000** | **6 jenis, 12 laporan** | **5.600.000** | **6 jenis, 12 laporan** | | **5.600.000** |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.01.01 |  | |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan | 6 jenis | | 6 jenis | - | | 6 jenis | | 0 | | 6 jenis | | 0 | 6 jenis | 0 | 6 jenis | 0 | 6 jenis | | - |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.01.02 |  | |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Jumlah laporan informasi kependudukan | 12 laporan | | 12 laporan | 5.000.000 | | 12 laporan | | 5.136.900 | | 12 laporan | | 5.390.627 | 12 laporan | 5.500.000 | 12 laporan | 5.600.000 | 12 laporan | | 5.600.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  |  |  | 7.01.02.2.02. |  | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | **Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan** | **6 jenis** | | **6 jenis** | **5.000.000** | | **6 jenis** | | **5.000.000** | | **6 jenis** | | **5.000.000** | **6 jenis** | **5.139.898** | **6 jenis** | **5.293.766** | **6 jenis** | | **5.293.766** | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  |  |  | 7.01.02.2.02.01 |  | |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | jumlah pelayanan yang direncanakan |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.02.02 |  | |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | jumlah fasilitasi yang dilaksanakan |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.02.03 |  | |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang dilaksanakan | 30 menit | | 25 menit | 5.000.000 | | 20 menit | | 5.000.000,0 | | 15 menit | | 5.000.000,0 | 10 menit | 5.139.898,0 | 8 menit | 5.293.766,0 | 8 menit | | 5.293.766 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  |  |  | 7.01.02.2.03. |  | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | **Persentase peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum** | **10%** | | **10%** | **-** | | **10%** | | **-** | | **10%** | | **-** | **10%** | **-** | **10%** | **-** | **10%** | | **-** |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.03.01 |  | |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | | jumlah koordinasi yang dilaksanakan |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.03.02 |  | |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | | jumlah prasarana dan fasiltas pelayanan umum yang terpelihara |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04. |  | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | **Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat** |  | | **5%** |  | | **5%** | |  | | **5%** | |  | **5%** |  | **5%** |  | **5%** | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.01 |  | |  | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | | jumlah layanan perizinan non usaha yang dilaksanakan |  | | - |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | - | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.02 |  | |  | pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | | jumlah layanan non perizinan yang dilaksanakan |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | - | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.03 |  | |  | pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | | jumlah kewenangan yang dilaksanakan |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | **Persentase peningkatan partisipasi masyrakat dalam membangun desa** | 0,6817 | | 0,6900 | 10.000.000 | | 0,7000 | | 10.136.900 | | 0,7100 | | 10.390.627 | 0,7150 | 10.639.898 | 0,7150 | 10.893.766 | 0,7150 | | 10.893.766 |  | |  |
|  |  |  | 7.01.03.2.01. |  | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | **Persentase peningkatan partisipasi masyrakat dalam membangun desa** | | 9% | | **10%** | | **73.000.000** | | **10%** | **10.136.900** | | **10%** | | **10.390.627** | **10%** | **10.639.898** | **10%** | **10.893.766** | **10%** | | **10.893.766** |  | |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 7.01.03.2.01.01 |  | |  | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang | | 200 orang | | 200 orang | | 70.000.000 | | 200 orang | 7.136.900,00 | | 200 orang | | 7.390.627,0 | 200 orang | 7.639.898,0 | 200 orang | 7.893.766,0 | 200 orang | | 7.893.766 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.03.2.01.02 |  | |  | Singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah dan swasta | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1.500.000 | | 1 kegiatan | 1.500.000 | | 1 kegiatan | | 1.500.000 | 1 kegiatan | 1.500.000 | 1 kegiatan | 1.500.000 | 1 kegiatan | | 1.500.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.03.2.01.03 |  | |  | peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | indeks kualitas hidup masyarakat yang meningkat | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 1.500.000 | | 1 kegiatan | 1.500.000 | | 1 kegiatan | | 1.500.000 | 1 kegiatan | 1.500.000 | 1 kegiatan | 1.500.000 | 1 kegiatan | | 1.500.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  |  |  | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | Persentase kasus kriminalitas di Tingkat Kecamatan | | 10,56% | | 9,50% | | 23.000.000 | | 8,75% | 23.314.870 | | 8,25% | | 23.898.441 | 7,50% | 24.471.765 | 6,50% | 25.055.661 | 6,50% | | 25.055.661 |  | |  |
|  |  |  | 7.01.04.2.01. |  | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | **Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan** | | **3 kegiatan** | | **3 kegiatan** | | **23.000.000** | | **3 kegiatan** | **23.314.870** | | **3 kegiatan** | | **23.898.441** | **3 kegiatan** | **24.500.000** | **3 kegiatan** | **25.055.661** | **3 kegiatan** | | **25.055.661** |  | |  |
|  | Meningkatkan Pembinaan Sosial Dan Keagamaan | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan sosial | 7.01.04.2.01.01 |  | |  | Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Menurunnya angka kriminalitas di Kecamatan | | 10 | | 9,5 | | 21.000.000 | | 8,75 | 21.314.870 | | 8,25 | | 21.898.441 | 7,5 | 22.000.000 | 6,5 | 22.555.661 | 6,5 | | 22.555.661 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Keagamaan | 7.01.04.2.01.02 |  | |  | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | Terciptanya hubungan harmonis dalam masyarakat | | 10 desa | | 10 desa | | 2.000.000 | | 10 desa | 2.000.000,0 | | 10 desa | | 2.000.000,0 | 2471765 | 2.500.000,0 | 10 desa | 2.500.000,0 | 10 desa | | 2.500.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  |  |  | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | **Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasn kepala daerah** | | 100 % | | 100 % | | 5.000.000 | | 100 % | 5.068.450 | | 100 % | | 5.195.313 | 100 % | 5.319.949 | 100 % | 5.446.883 | 100 % | | 5.446.883 |  | |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01. |  | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | **Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasn kepala daerah** | | **100,00%** | | **100%** | | **5.000.000** | | **100,00%** | | **5.068.450** | **100,00%** | | **5.195.313** | **100%** | **5.319.949** | **100,00%** | **5.446.883** | **100,00%** | | **5.446.883** |  | |  |
|  |  | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan sosial | 7.01.05.2.01.01 |  | |  | Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila ,pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI | Meningkatnya kecintaan terhadap tanah air | | 2 kegiatan | | 2 kegiatan | | 5.000.000 | | 2 kegiatan | | 5.068.450 | 2 kegiatan | | 5.195.313 | 2 kegiatan | 5.319.949 | 2 kegiatan | 5.446.883 | 2 kegiatan | | 5.446.883 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.02 |  | |  | Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | - | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.03 |  | |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  | Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan sosial ) | 7.01.05.2.01.04 |  | |  | Pembinaan Kerukunan Antar suku dan intra suku,umat beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal,regional dan nasional | Terciptanya kerukunan masyarakat | | 10 desa | | 10 desa | | - | | 10 desa | | 0,00 | 10 desa | | 0,0 | 10 desa | 0,0 | 10 desa | 0,0 | 10 desa | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.05 |  | |  | Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peratuuran perundang-undangan |  | |  | | - | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | - | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.06 |  | |  | Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.07 |  | |  | Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.08 |  | |  | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | Persentase program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah | | 100 % | | 100 % | | 15.000.000 | | 100 % | | 15.205.350 | 100 % | | 15.585.940 | 100 % | 15.959.847 | 100 % | 16.340.649 | 100 % | | 16.340.649 |  | |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01 |  | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Jumlah fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan | | 7 kegiatan | | 7 kegiatan | | **15.000.000** | | 7 kegiatan | | **15.205.350** | | 7 kegiatan | **15.585.940** | 7 kegiatan | **15.959.847** | 7 kegiatan | **16.340.649** | 7 kegiatan | | **16.340.649** |  | |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.01 |  | |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah fasilitasi penyusunan perdes dan peraturan kepala desa yang dilaksanakan | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | | - |  | |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.02 |  | |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi pelaksanaan lomba administrasi tata pemerintahan desa Tk kecamatan | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 7.500.000 | | 1 kegiatan | | 0,00 | | 1 kegiatan | 0,0 | 1 kegiatan | 8.000.000,0 | 1 kegiatan | 0,0 | 1 kegiatan | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.06.2.01.03 |  | |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terlaksana | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | 7.500.000 | | 1 kegiatan | | 0,00 | | 1 kegiatan | 0,0 | 1 kegiatan | 0,0 | 1 kegiatan | 8.340.649,0 | 1 kegiatan | | 8.340.649 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.04 |  | |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah penegakan perda yang terlaksana | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.05 |  | |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang terlaksana | | 1 kegiatan | | 1 kegiatan | | - | | 1 kegiatan | | 7.500.000,00 | | 1 kegiatan | 0,0 | 1 kegiatan | 0,0 | 1 kegiatan | 0,0 | 1 kegiatan | |  | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.06 |  | |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.07 |  | |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah BPD yang difasilitasi | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.06.2.01.08 |  | |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Rekomendasi yang dilterbitkan | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.06.2.01.09 |  | |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun | | 4 dokumen | | 4 dokumen | | - | | 4 dokumen | | 7.705.350,00 | | 4 dokumen | 0,0 | 4 dokumen | 0,0 | 4 dokumen | 0,0 | 4 dokumen | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.06.2.01.10 |  | |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah lokasi pembangunan kawasan perdesaan | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.11 |  | |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah kasus yang tertangani | | 9 | | 9 | | - | | 8 | | 0,00 | | 7 | 7.585.940,0 | 6 | 0,0 | 5 | 0,0 | 5 | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.06.2.01.12 |  | |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.06.2.01.13 |  | |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah dokumen penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif yang dilaksanakan | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.06.2.01.14 |  | |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | Jumlah kerjasama antar desa yang terjalin | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.06.2.01.15 |  | |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah penetapan dan penegasan batas desa yang terlaksana | | 10 desa | | 10 desa | | - | | 10 desa | | 0,00 | | 10 desa | 8.000.000,0 | 10 desa | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 desa | | - | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  | 7.01.06.2.01.16 |  | |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah pemberdayaan masyarakat desa yang terlaksana | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.06.2.01.17 |  | |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah koordinasi pendamping desa | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 7.01.06.2.01.18 |  | |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah pembangunan kawasan perdesaan yang terlaksana | | 2 kawasan | | 2 kawasan | | - | | 2 kawasan | | 0,00 | | 0 | 0,0 | 2 kawasan | 7.959.847,0 | 2 kawasan | 8.000.000,0 | 2 kawasan | | 8.000.000 | Kec. Bontomanai | | Kec. Bontomanai |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  | Rp 2.224.056.228 | | | | Rp 2.296.495.667 | | | | Rp 2.310.925.694 | | Rp 2.366.393.037 | | Rp 2.422.826.266 | | | Rp 2.422.826.266 | | |  |  |

Tabel 6.2.Perubahan Rencana Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bontomanai 2021-2026

Kabupaten Kepulauan Selayar ( Tabel T-C.27 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **KODE** | **Program Kegiatan dan Sub Kegiatan** | | | | **Indiaktor Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan** | | | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja OPD Penang gung Jawab** | | | **Lokasi** | |
| **Tahun 1** | | | | | **Tahun 2** | | | | | | **Tahun 3** | | | | | | **Tahun 4** | | | | **Tahun 5** | | | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra** | | | | |
| **2022** | | | | | **2023** | | | | | | **2024** | | | | | | **2025** | | | | **2026** | | | |
| **Tar-get** | | **Rp.** | | | **Tar--get** | | **Rp.** | | | | **Tar-get** | | | | **Rp.** | | **Tar-get** | | **Rp.** | | **Tar-get** | | **Rp.** | | **Tar-get** | | | **Rp.** | |
| 1 | 2 | 3 |  | 6 | | | | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | | 20 | | 21 | | | 22 | |
|  | Mewujudkan Reformasi Birokrasi Kecamatan Bontomanai | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan |  |  | |  |  | Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Bontomanai | 33,89 | | | 55 | |  | | | 64 | |  | | | | 68 | | | |  | | 73 | |  | | 76 | |  | | 76 | | |  | |  | | |  | |
|  |  | Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan |  |  | |  |  | Nilai SAKIP Kecamatan Bontomanai | 58,85 | | | 60 | |  | | | 65 | |  | | | | 70 | | | |  | | 75 | |  | | 80 | |  | | 80 | | |  | |  | | |  | |
|  |  | **Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Kecamatan sesuai SAP** |  |  | |  |  | Indeks pengelolaan keuangan Kecamatan Bontomanai | n/a | | | 65,350 | |  | | | 72,100 | |  | | | | 73,950 | | | |  | | 77,650 | |  | | 79,350 | |  | | 79,350 | | |  | |  | | |  | |
|  |  | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat |  |  | |  |  | Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Bontomanai | 66,68 | | | 70 | |  | | | 72,50 | |  | | | | 75 | | | |  | | 80 | |  | |  | | 85 | | 85 | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | Persentase capaian kinerja Kecamatan Bontomanai (%) | 50,91 | | | 63,03 | | Rp 2.299.498.510 | | | 70,28 | | Rp 2.330.978.645 | | | | 70,53 | | | | Rp 2.389.323.040 | | 71,51 | | Rp 2.446.642.900 | | 72,31 | | Rp 2.505.019.799 | | 72,31 | | | Rp 2.505.019.799 | |  | | |  | |
|  |  |  |  | | | | Persentase capaian kinerja keuangan Kecamatan Bontomanai (%) | 79,35 | | | 83,00 | |  | | | 85,00 | |  | | | | 88,00 | | | |  | | 91,00 | |  | | 95,00 | |  | | 95,00 | | |  | |  | | |  | |
|  |  | 7.01.01.2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | **Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu (%)** | 73 | | | 80 | | 5.000.000 | | | 83 | | 7.000.000 | | | | 85 | | | | 10.000000 | | 88 | | 20.000.000 | | 95 | | 23.000.000 | | 95 | | | 23.000.000 | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.01.01 |  |  | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Kantor Kecamatan Bontomanai | 3 dokumen | | | 3 dokumen | | 5.000.000,0 | | | 3 dokumen | | 7.000.000,0 | | | | 3 dokumen | | | | 10.000.000,0 | | 3 dokumen | | 10.000.000,0 | | 3 dokumen | | 11.000.000,0 | | 3 dokumen | | | 11.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.01.02 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Kator Kecamatan Bontomanai dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA Kecamatan Bontomanai | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | 0,0 | | | 1 dokumen | | 0,0 | | | | 1 dokumen | | | | 0,0 | | 1 dokumen | | 2.500.000,0 | | 1 dokumen | | 3.000.000,0 | | 1 dokumen | | | 3.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.01.03 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA Kator Kecamatan Bontomanai dan laporan hasil koordinasi penyusunan Perubahan RKA Kecamatan Bontomanai | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | 0,0 | | | 1 dokumen | | 0,0 | | | | 1 dokumen | | | | 0,0 | | 1 dokumen | | 2.500.000,0 | | 1 dokumen | | 3.000.000,0 | | 1 dokumen | | | 3.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.01.04 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA Kator Kecamatan Bontomanai dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA Kecamatan Bontomanai | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | 0,0 | | | 1 dokumen | | 0,0 | | | | 1 dokumen | | | | 0,0 | | 1 dokumen | | 2.500.000,0 | | 1 dokumen | | 3.000.000,0 | | 1 dokumen | | | 3.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.01.05 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA Kator Kecamatan Bontomanai dan laporan hasil koordinasi penyusunan Perubahan DPA Kecamatan Bontomanai | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | 0,0 | | | 1 dokumen | | 0,0 | | | | 1 dokumen | | | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | | 0,0 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.01.06 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kantor Kecamatan Bontomanai dan laporan hasil koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kantor Kecamatan Bontomanai | 3 laporan | | | 3 laporan | | 0,0 | | | 3 laporan | | 0,0 | | | | 3 laporan | | | | 0,0 | | 3 laporan | | 2.500.000,0 | | 3 laporan | | 3.000.000,0 | | 3 laporan | | | 3.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.01.07 |  |  | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja Kantor Kecamatan Bontomanai |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  |  | 7.01.01.2.02. |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | Persentase dokumen/ laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 73 | | | 80 | | 1.806.650.726 | | | 83 | | 1.774.756.175 | | | | **85** | | | | 1.828.862.092 | | **88** | | 1.842.683.281 | | **95** | | 1.854.889.074 | | **95** | | | 1.854.889.074 | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.02.01 |  |  | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 36 orang/12 bulan | | | 36 orang/12 bulan | | 1.799.650.726 | | | 36 0rang/12 bulan | | 1.767.756.175 | | | | 36 orang/12 bulan | | | | 1.818.862.092 | | 36 orang/12 bulan | | 1.830.583.281 | | 36 orang/12 bulan | | 1.842.389.074 | | 36 orang/12 bulan | | | 1.842.389.074 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.02.02 |  |  | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelakaanaan tugas ASN |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.02.03 |  |  | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Kantor Kecamatan Bontomanai |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.02.04 |  |  | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Kantor Kecamatan Bontomanai |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.02.05 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun Kantor Kecamatan Bontomanai dn laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangn akhir tahun Kantor Kecamatan Bontomanai | 1 laporan | | | 1 laporan | | 7.000.000 | | | 1 laporan | | 7.000.000 | | | | 1 laporan | | | | 10.000.000 | | 1 laporan | | 10.000.000,00 | | 1 laporan | | 10.000.000,00 | | 1 laporan | | | 10.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.02.06 |  |  | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.02.07 |  |  | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kantor Kecamatan Bontomanai dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Kantor Kecamatan Bontomanai | 12 laporan | | | 12 laporan | | - | | | 12 laporan | | 0 | | | | 12 laporan | | | | 0 | | 12 laporan | | 2.100.000,00 | | 12 laporan | | 2.500.000,00 | | 12 laporan | | | 2.500.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.02.08 |  |  | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.03 |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu (%) | 73 | | | 80 | | **0,0** | | | **83** | | **0,0** | | | | **85** | | | | **1.500.000,0** | | **88** | | **2.500.000,0** | | **95** | | **3.000.000,0** | | **95** | | | **3.000.000,0** | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.03.01 |  |  | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Bontomanai |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.03.02 |  |  | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Kantor Kecamatan Bontomanai |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.03.03 |  |  | | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah pada Kantor kecamatan Bontomanai |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.03.04 |  |  | | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Kantor kecamatan Bontomanai |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.03.05 |  |  | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Kantor kecamatan Bontomanai | 1 laporan | | | 1 laporan | | - | | | 1 laporan | | 0,0 | | | | 1 laporan | | | | 1.500.000,0 | | 1 laporan | | 2.500.000,0 | | 1 laporan | | 3.000.000,0 | | 1 laporan | | | 3.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.03.06 |  |  | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kantor kecamatan Bontomanai |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.03.07 |  |  | | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kantor kecamatan Bontomanai |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | 7.01.01.2.05. |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | Persentase ketersediaan dokumen Administrasi  kepegawaian (%) | **73** | | | **80** | | **10.000.000,0** | | | **83** | | **10.000.000,0** | | | | **85** | | | | **33.000.000,0** | | **88** | | **25.000.000,0** | | **95** | | **47.600.000,0** | | **95** | | | **47.600.000,0** | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.05,.01 |  |  | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.05.02 |  |  | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 36 paket | | | 36 paket | | - | | | 36 paket | | - | | | | 36 paket | | | | 18.000.000 | | 36 paket | | - | | 40 paket | | 22.600.000 | | 40 paket | | | 22.600.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.05.03 |  |  | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.05.04 |  |  | | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | - | | | 1 dokumen | | 0,0 | | | | 1 dokumen | | | | 0,0 | | 1 dokumen | | 5.000.000,0 | | 1 dokumen | | 5.000.000,0 | | 1 doumen | | | 5.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.05.05 |  |  | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.05.06 |  |  | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkanTugas dan Fungsi | 2 orang | | | 2 orang | | 10.000.000 | | | 2 orang | | 10.000.000 | | | | 3 orang | | | | 15.000.000,0 | | 4 orang | | 20.000.000,0 | | 4 orang | | 20.000.000,0 | | 4 orang | | | 20.000.000 | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.05.07 |  |  | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.05.08 |  |  | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan-Undangan Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.06 |  |  | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | Persentase pemeliharaan  administrasi  umum  perkantoran (%) | **73** | | | **80** | | **46.487.784,0** | | | **83** | | **50.000.000,0** | | | | **85** | | | | **60.000.000,0** | | **88** | | **70.000.000,0** | | **95** | | **82.500.000,0** | | **95** | | | **82.500.000,0** | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.06.01 |  |  | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 paket | | | 2 paket | | - | | | 2 paket | | 0,0 | | | | 2 paket | | | | 0,0 | | 2 paket | | 0,0 | | 2 paket | | 5.000.000,0 | | 2 paket | | | 5.000.000 | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.06.02 |  |  | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | | | 1 paket | | 5.000.000 | | | 1 paket | | 5.000.000,0 | | | | 1 paket | | | | 10.000.000,0 | | 1 paket | | 10.000.000,0 | | 1 paket | | 10.000.000,0 | | 1 paket | | | 10.000.000 | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.06.03 |  |  | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.06.04 |  |  | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.06.05 |  |  | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.06.06 |  |  | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | - | | | 2 dokumen | | 0,0 | | | | 2 dokumen | | | | 0,0 | | 2 dokumen | | 0,0 | | 2 dokumen | | 2.500.000,0 | | 2 dokumen | | | 2.500.000 | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.06.07 |  |  | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.06.08 |  |  | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.06.09 |  |  | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250 laporan | | | 255 laporan | | 41.487.784 | | | 257 laporan | | 45.000.000,0 | | | | 260 laporan | | | | 50.000.000,0 | | 265 laporan | | 60.000.000,0 | | 270 laporan | | 65.000.000,0 | | 270 laporan | | | 65.000.000 | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.06.10 |  |  | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.06.11 |  |  | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.07 |  |  | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase Ketersediaan BMD (%) | **73** | | | **80** | | **0,0** | | | **83** | | **0,0** | | | | **85** | | | | **0,0** | | **88** | | **10.000.000,0** | | **95** | | **0,0** | | **95** | | | **0,0** | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.07.01 |  |  | | Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.07.02 |  |  | | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 unit | | | 1 unit | | - | | | 1 unit | | 0,0 | | | | 1 unit | | | | 0,0 | | 1 unit | | 0,0 | | 1 unit | | 0,0 | | 1 unit | | | - | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.07.04 |  |  | | Pengadaan Alat angkutan darat tak bermotor | Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.07.05 |  |  | | Pengadaan mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 paket | | | 1 paket | | 0,0 | | | 1 paket | | 0,0 | | | | 1 paket | | | | 0,0 | | 1 paket | | 0,0 | | 1 paket | | 0,0 | | 1 paket | | | - | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.07.06 |  |  | | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 unit | | | 3 unit | | - | | | 3 unit | | 0,0 | | | | 3 unit | | | | 0,0 | | 3 unit | | 10.000.000,0 | | 3 unit | | 0,0 | | 3 unit | | | - | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.07.07 |  |  | | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.07.08 |  |  | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.07.09 |  |  | | Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.07.10 |  |  | | pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.07.11 |  |  | | Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.08 |  |  | | **Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | Persentase pemeliharaan penunjang  urusan pemerintahan daerah (%) | **73** | | | **80** | | **317.000.000,0** | | | **83** | | **318.000.000,0** | | | | **85** | | | | **327.140.000,0** | | **88** | | **331.040.000,0** | | **95** | | **339.040.000,0** | | **95** | | | **339.040.000,0** | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.08.01 |  |  | | Penyediaan Jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.08.02 |  |  | | Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 laporan | | | 3 laporan | | 7.000.000 | | | 3 laporan | | 7.000.000,0 | | | | 3 laporan | | | | 7.140.000,0 | | 3 laporan | | 8.040.000,0 | | 3 laporan | | 9.040.000,0 | | 3 laporan | | | 9.040.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.08.03 |  |  | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.08.04 |  |  | | Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 laporan | | | 7 laporan | | 310.000.000 | | | 7 laporan | | 311.000.000,0 | | | | 7 laporan | | | | 320.000.000,0 | | 7 laporan | | 323.000.000,0 | | 7 laporan | | 330.000.000,0 | | 7 laporan | | | 330.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.09 |  |  | | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | Persentase  pemenuhan pemeliharan Barang Milik Daerah (%) | **73** | | | **80** | | **51.360.000,0** | | | **83** | | **65.360.000,0** | | | | **85** | | | | **63.360.000,0** | | **88** | | **78.360.000,0** | | **95** | | **86.360.000,0** | | **95** | | | **86.360.000,0** | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.09.01 |  |  | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit | | | 1 unit | | 33.360.000 | | | 1 unit | | 33.360.000 | | | | 1 unit | | | | 33.360.000,0 | | 1 unit | | 33.360.000 | | 1 unit | | 33.360.000 | | 1 unit | | | 33.360.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.09..02 |  |  | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 unit | | | 5 unit | | 18.000.000 | | | 6 unit | | 18.000.000 | | | | 7 unit | | | | 18.000.000,0 | | 8 unit | | 18.000.000 | | 9 unit | | 18.000.000 | | 9 unit | | | 18.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.09.04 |  |  | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.09.05 |  |  | | Pemeliharaan Mebel | jumlah Mebel yang Dipelihara | 5 unit | | | 3 unit | | - | | | 3 unit | | 0,0 | | | | 3 unit | | | | 0,0 | | 3 unit | | 2.000.000,0 | | 3 unit | | 5.000.000,0 | | 3 unit | | | 5.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.09.06 |  |  | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 unit | | | 2 unit | | - | | | 2 unit | | 2.000.000,0 | | | | 2 unit | | | | 2.000.000,0 | | 3 unit | | 2.500.000,0 | | 5 unit | | 5.000.000,0 | | 5 unit | | | 5.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.09.07 |  |  | | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 2 unit | | | 2 unit | | - | | | 2 unit | | 2.000.000,0 | | | | 2 unit | | | | 0,0 | | 3 unit | | 2.500.000,0 | | 5 unit | | 5.000.000,0 | | 5 unit | | | 5.000.000 | |  | | |  | |
|  | 7.01.01.2.09.09 |  |  | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | | | 2 unit | | - | | | 2 unit | | 10.000.000,0 | | | | 2 unit | | | | 10.000.000,0 | | 2 unit | | 15.000.000,0 | | 2 unit | | 15.000.000,0 | | 2 unit | | | 15.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.09.10 |  |  | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | | | 2 unit | | - | | | 2 unit | | 0,0 | | | | 2 unit | | | | 0,0 | | 2 unit | | 5.000.000,0 | | 2 unit | | 5.000.000,0 | | 2 unit | | | 5.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.01.2.09.11 |  |  | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.01.2.05.12 |  |  | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | **Peningkatan pelayanan di tingkat Kecamatan dan Desa** | **30 menit** | | | **25 menit** | | **10.000.000** | | | **20 menit** | | **10.136.900** | | | | **15 menit** | | | | **10.390.627** | | **10 menit** | | **10.639.898** | | **8 menit** | | **10.893.766** | | **8 menit** | | | **10.893.766** | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02.2.01 |  | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Persentase Penyeleng garaan  kegiatan  pemerintahan yang  dikoordinasikan (%) | **73** | | | **80** | | **5.000.000** | | | **83** | | **5.136.900** | | | | **85** | | | | **5.390.627** | | **88** | | **5.500.000** | | **95** | | **5.600.000** | | **95** | | | **5.600.000** | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02.2.01.01 |  | |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02.2.01.02 |  | |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 12 dokumen | | | 12 dokumen | | 5.000.000 | | | 12 dokumen | | 5.136.900 | | | | 12 dokumen | | | | 5.390.627 | | 12 dokumen | | 5.500.000 | | 12 dokumen | | 5.600.000 | | 12 dokumen | | | 5.600.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  |  |  | 7.01.02.2.02. |  | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | Persentase Urusan pemerintahan yang diselenggaran (%) | **73** | | | **80** | | **5.000.000** | | | **83** | | **5.000.000** | | | | **85** | | | | **5.000.000** | | **88** | | **5.139.898** | | **95** | | **5.293.766** | | **95** | | | **5.293.766** | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  |  |  | 7.01.02.2.02.01 |  | |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02.2.02.02 |  | |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02.2.02.03 |  | |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 laporan | | | 1 laporan | | 5.000.000 | | | 1 laporan | | 5.000.000,0 | | | | 1 laporan | | | | 5.000.000,0 | | 1 laporan | | 5.139.898,0 | | 1 laporan | | 5.293.766,0 | | 1 laporan | | | 5.293.766 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  |  |  | 7.01.02.2.03. |  | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | Persentase Sarana &Prasaranan  Umum yang  dipelihara |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02.2.03.01 |  | |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02.2.03.02 |  | |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02.2.04. |  | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | **Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat** |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.01 |  | |  | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan |  | | | - | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.02 |  | |  | pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.02.2.04.03 |  | |  | pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaaan Kecamatan Bontomanai | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa |  |  | |  |  | Perdentase peningkatan fungsi lembaga desa yang dikoordinasikan (%) | 63 | | | 63 | |  | | | 66 | |  | | | | 70 | | | |  | | 71 | |  | | 73 | |  | | 73 | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | **Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)** | 100 | | | 100 | | 10.000.000 | | | 100 | | 10.136.900 | | | | 100 | | | | 10.390.627 | | 100 | | 10.639.898 | | 100 | | 10.893.766 | | 100 | | | 10.893.766 | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.03.2.01. |  | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | Persentase Kegiatan  Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan | | 100 | | | **100** | | **10.000.000** | **100** | | | | **10.136.900** | | | | **100** | | | | **10.390.627** | | **100** | | **10.639.898** | | **100** | | **10.893.766** | | **100** | | | **10.893.766** | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.03.2.01.01 |  | |  | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 7 lembaga | | | 7 lembaga | | 7.000.000 | 7 lembaga | | | | 7.136.900,00 | | | | 7 lembaga | | | | 7.390.627,0 | | 7 lembaga | | 7.639.898,0 | | 7 lembaga | | 7.893.766,0 | | 7 lembaga | | | 7.893.766 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.03.2.01.02 |  | |  | Singkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | 1.500.000 | 1 dokumen | | | | 1.500.000 | | | | 1 dokumen | | | | 1.500.000 | | 1 dokumen | | 1.500.000 | | 1 dokumen | | 1.500.000 | | 1 dokumen | | | 1.500.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.03.2.01.03 |  | |  | peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | 1 laporan | | | 1 laporan | | 1.500.000 | 1 laporan | | | | 1.500.000 | | | | 1 laporan | | | | 1.500.000 | | 1 laporan | | 1.500.000 | | 1 laporan | | 1.500.000 | | 1 laporan | | | 1.500.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | Meningkatnya kapasitas kelembagaan keagamaan di Kecamatan Bontomanai |  |  |  | |  |  | Indeks Kesalehan social | | n/a | | | 63 | |  | 65,15 | | | |  | | | | 67,30 | | | |  | | 70,00 | |  | | 75,00 | |  | | 75,00 | | |  | |  | | |  | |
|  |  | Meningkatnya toleransi kehidupan social kemasyarakatan di Kecamatan Bontomanai |  |  | |  |  | Tingkat toleransi di Kecamatan | | 63,00 | | | 65,00 | |  | 66,00 | | | |  | | | | 68,00 | | | |  | | 72,00 | |  | | 77,00 | |  | | 77,00 | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | Persentase kasus criminal di tingkat Kecamatan (%) | | n/a | | | 1,00 | | 23.000.000 | 1,00 | | | | 23.314.870 | | | | 1,00 | | | | 23.898.441 | | 1,00 | | 24.471.765 | | 1,00 | | 25.055.661 | | 1,00 | | | 25.055.661 | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.04.2.01. |  | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | **Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan** | | **12 laporan** | | | **12 laporan** | | **23.000.000** | **12 laporan** | | | | **23.314.870** | | | | **12 laporan** | | | | **23.898.441** | | **12 laporan** | | **24.500.000** | | **12 laporan** | | **25.055.661** | | **12 laporan** | | | **25.055.661** | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.04.2.01.01 |  | |  | Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | 12 laporan | | | 12 laporan | | 21.000.000 | 12 laporan | | | | 21.314.870 | | | | 12 laporan | | | | 21.898.441 | | 12 laporan | | 22.000.000 | | 12 laporan | | 22.555.661 | | 12 laporan | | | 22.555.661 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  |  | 7.01.04.2.01.02 |  | |  | Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat | Terciptanya hubungan harmonis dalam masyarakat | | 10 desa | | | 10 desa | | 2.000.000 | 10 desa | | | | 2.000.000,0 | | | | 10 desa | | | | 2.000.000,0 | | 2471765 | | 2.500.000,0 | | 10 desa | | 2.500.000,0 | | 10 desa | | | 2.500.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan social di Kecamatan Bontomanai |  |  |  | | | | **Indeks Ketahanan Sosial** | | 0,6817 | | | 0,6900 | |  | 0,7000 | | | |  | | | | 0,7100 | | | |  | | 0,7150 | |  | | 0,7150 | |  | | 0,7150 | | |  | |  | | |  | |
|  |  | Meningkatnya tatanan kehidupan social masyarakat |  |  | | | | **Tingkat solidaritas social di Kecamatan** | | 60,00 | | | 69,00 | |  | 70,00 | | | |  | | | | 71,00 | | | |  | | 71,50 | |  | | 73,00 | |  | | 73,00 | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | **Persentase konflik social dan keagamaan di tingkat kecamatan (%)** | | 0,0 | | | 0,0 | | 5.000.000 | 0,0 | | | | 5.068.450 | | | | 0,0 | | | | 5.195.313 | | 0,0 | | 5.319.949 | | 0,0 | | 5.446.883 | | 0,0 | | | 5.446.883 | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.05.2.01. |  | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | **Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasn kepala daerah** | | **100,00%** | | | **100%** | | **5.000.000** | **100,00%** | | | | | **5.068.450** | **100,00%** | | | | | | **5.195.313** | | **100%** | | **5.319.949** | | **100,00%** | | **5.446.883** | | **100,00%** | | | **5.446.883** | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.01 |  | |  | Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila ,pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | 300 orang | | | 300 orang | | 5.000.000 | 300 orang | | | | | 5.068.450 | 300 orang | | | | | | 5.195.313 | | 300 orang | | 5.319.949 | | 300 orang | | 5.446.883 | | 300 orang | | | 5.446.883 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.02 |  | |  | Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional | umlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | |  | | |  | |  |  | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.03 |  | |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa | jumlah  Orang  yang  Mengikuti  Pembinaan  Persatuan dan Kesatuan Bangsa | |  | | |  | |  |  | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.04 |  | |  | Pembinaan Kerukunan Antar suku dan intra suku,umat beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal,regional dan nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | |  | | |  | |  |  | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.05 |  | |  | Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peratuuran perundang-undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | |  | | | - | |  |  | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.06 |  | |  | Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila | |  | | |  | |  |  | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.07 |  | |  | Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | |  | | |  | |  |  | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.05.2.01.08 |  | |  | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | |  | | |  | |  |  | | | | |  |  | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Bontomana |  |  |  | |  |  | Indeks desa membangun | | 0,6061 | | | 0,6300 | |  | 0,6650 | | | | |  | 0,7000 | | | | | |  | | 0,7150 | |  | | 0,7300 | |  | | 0,7300 | | |  | |  | | |  | |
|  |  | Meningkatnya kualitas pemerintahan desa |  |  | |  |  | Persentase Urusan pemerintahan desa yang difasilitasi (%) | | 73 | | | 80 | |  | 83 | | | | |  | 85 | | | | | |  | | 88 | |  | | 95 | |  | | 95 | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | Persentase program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%) | | 40 | | | 50 | | 15.000.000 | 55 | | | | | 15.205.350 | 60 | | | | | | 15.585.940 | | 65 | | 15.959.847 | | 70 | | 16.340.649 | | 70 | | | 16.340.649 | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.06.2.01 |  | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | Jumlah laporan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan | | 12 laporan | | | 12 laporan | | **15.000.000** | 12 laporan | | | | | **15.205.350** | | | | 12 laporan | | | **15.585.940** | | 12 laporan | | **15.959.847** | | 12 laporan | | **16.340.649** | | 12 laporan | | | **16.340.649** | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.01 |  | |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | - | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.02 |  | |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | 7.500.000 | 2 dokumen | | | | | 0,00 | | | | 2 dokumen | | | 0,0 | | 2 dokumen | | 8.000.000,0 | | 2 dokumen | | 0,0 | | 2 dokumen | | | - | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.06.2.01.03 |  | |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | 7.500.000 | 1 dokumen | | | | | 0,00 | | | | 1 dokumen | | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 8.340.649,0 | | 1 dokumen | | | 8.340.649 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.04 |  | |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.05 |  | |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | - | 1 dokumen | | | | | 7.500.000,00 | | | | 1 dokumen | | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | |  | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.06 |  | |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  |  | 7.01.06.2.01.07 |  | |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.06.2.01.08 |  | |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.06.2.01.09 |  | |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | 4 dokumen | | | 4 dokumen | | - | 4 dokumen | | | | | 7.705.350,00 | | | | 4 dokumen | | | 0,0 | | 4 dokumen | | 0,0 | | 4 dokumen | | 0,0 | | 4 dokumen | | | - | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.06.2.01.10 |  | |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan  Kawasan Perdesaan | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa | 7.01.06.2.01.11 |  | |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | - | 1 dokumen | | | | | 0,00 | | | | 1 dokumen | | | 7.585.940,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | | - | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.06.2.01.12 |  | |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah  Pelaksanaan  tugas, fungsi,  dan kewajiban  lembaga  kemasyarakatan yang  difasilitasi | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.06.2.01.13 |  | |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | umlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.06.2.01.14 |  | |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.06.2.01.15 |  | |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | - | 1 dokumen | | | | | 0,00 | | | | 1 dokumen | | | 8.000.000,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | 0,0 | | 1 dokumen | | | - | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  | 7.01.06.2.01.16 |  | |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah umlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.06.2.01.17 |  | |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | J Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | |  | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | 7.01.06.2.01.18 |  | |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | 1 laporan | | | 1 laporan | | - | 1 laporan | | | | | 0,00 | | | | 1 laporan | | | 0,0 | | 1 laporan | | 7.959.847,0 | | 1 laporan | | 8.000.000,0 | | 1 laporan | | | 8.000.000 | | Kec. Bontomanai | | | Kec. Bontomanai | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  | | 2.299.498.510 | | | | | 2.330.978.645 | | | | | | | | 2.389.323.040 | | | | 2.446.671.135 | | | | 2.505.019.799 | | | | | 2.505.019.799 | | | | |  | |  | |

Tabel. 6.2 Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar

**BAB VII**

**KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Kecamatan Bontomanai menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bontomanai dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Bontomanai akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bontomanai dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.
6. Terlaksananya peletakan landasan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN INDONESIA TIMUR.

Tabel 7.1. ( TC.28 )

Indikator Kinerja Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026

(mengacu pada tujuan,indicator program dan sasaran RPJMD)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | | | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD |
| Tahun 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 |  |  | UNSUR KEWILAYAHAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 |  | Kecamatan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 1 | Peningkatan pelayanan di Kecamatan Bontomanai | menit | 30 menit | 25 menit | 20 menit | 15 menit | 10 menit | 8 menit | 8 menit |
| 8 | 1 | 2 | Persentase partisipasi masyarakat Bontomanai dalam perencanaan pembangunan | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 1 | 3 | Persentase kasus kriminalitas di Kecamatan Bontomanai | % | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 4 | Persentase konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan Bontomanai | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 5 | Persentase program pemerintahn desa yang mendukung program pemerintah | % | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bontomanai sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rencana strategis Kecamatan Bontomanai merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan kurung tahun 2021 – 2026.

Visi Kecamatan Bontomanai sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Bontomanai. Rencana strategis Kecamatan Bontomanai akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Penjabaran Renstra Kecamatan Bontomanai Periode 2021 – 2026 lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 dan tahun-tahun selanjutnya sesuai periode RPJMD hingga tahun 2026. Penanggung jawab pelaksanaan Renstra periode 2021 – 2026 adalah Camat Bontomanai yang dalam pengimplementasiannya ke dalam renja tahun berikutnya bersama dengan BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan renstra periode 2021 – 2026.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepualauan Selayar sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bontomanai.

Polebunging, April 2021

**Camat Bontomanai,**

**ZULFIKRI,S.STP.**

Nip. 19790818 199111 1 002